



**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN
DAN KESENJANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010 – 2014**

SKRIPSI

Oleh

**DEVIS FAUQIATU TAQWA
NIM 120810101005**

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN
DAN KESENJANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010 - 2014**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

DEVIS FAUQIATU TAQWA

NIM 120810101005

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sumini, Ayahanda Soepardi (Alm.), Mbak Sri Lestari, Mbak Sulami, Mbak Lejarwati (Almh.) dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, kasih sayang dan pengorbanan selama ini.
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu, mengarahkan dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu,
namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat
mengejanya
(Abraham Lincoln)

Untuk meraih sebuah kesuksesan, karakter seseorang adalah
lebih penting dari pada intelegensi
(Gilgerte Beaux)

Melakukan hal yang berguna, mengatakan suatu keberanian dan
merenungkan suatu keindahan adalah hal yang perlu
dilakukan dalam kehidupan seseorang
(TS Eliot)

Jika engkau ingin melihat indahny fajar, maka engkau harus
melalui gelapnya malam
(Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devis Fauqiatu Taqwa

NIM : 120810101005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Dan Kesenjangan Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2014” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Mei 2016
Yang menyatakan,

Devis Fauqiatu Taqwa
120810101005

SKRIPSI

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN
DAN KESENJANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010 - 2014**

Oleh

Devis Fauqiatu Taqwa

NIM 120810101005

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Teguh Hadi P., S.E., M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Siswoyo Hari S., S.E., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan
Dan Kesenjangan Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun
2010 - 2014

Nama Mahasiswa : Devis Fauqiatu Taqwa

NIM : 120810101005

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 03 Mei 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Teguh Hadi P., S.E., M.Si
NIP. 19700206 199403 1 002

Dr. Siswoyo Hari S., S.E., M.Si
NIP. 19680715 199303 1 001

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan,

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN
DAN KESENJANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010-2014**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Devis Fauqiatu Taqwa
NIM : 120810101005
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

13 Mei 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Herman Cahyo D., S.E., M.P. (.....)
NIP. 197207131999031001
2. Sekretaris : Dr. Zainuri M.Si. (.....)
NIP. 196403251989021001
3. Anggota : Aisah Jumiati S.E., M.P. (.....)
NIP. 196809261994032002

Foto

4x6

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si.
NIP. 19630614199002 1 001

*Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan dan Kesenjangan di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014*

Devis Fauqiatu Taqwa

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses gradual yang diharapkan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk menunjang pembangunan nasional. Desentralisasi merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu membawa perubahan tatanan pemerintahan kearah yang lebih baik. Salah satu aspek yang berperan penting dalam desentralisasi adalah desentralisasi fiskal yaitu pemberian kewenangan yang disertai dengan kewenangan pendanaan yang bertujuan meningkatkan optimalisasi kewenangan yang telah di desentralisasikan kepada pemerintah daerah. Aspek keuangan mempunyai peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan dalam distribusi pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan dan kesenjangan daerah di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model *fixed effect* (FEM). Hasil yang diperoleh yaitu desentralisasi fiskal dan variabel kontrol memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif cenderung di daerah pusat industri. Sedangkan pada model kesenjangan, variabel desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap kesenjangan daerah dan variabel kontrol memiliki pengaruh yang positif terhadap kesenjangan daerah serta cenderung meningkatkan kesenjangan di wilayah perkotaan.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Daerah

The Influence of Fiscal Decentralization on Growth and Disparity in East Java Province at 2010-2014

Devis Fauqiatu Taqwa

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRACT

Regional economic development is a gradual process that is expected to continue to increase along with the need to support national development. Decentralization is a strategic step that is expected to bring a change in structure of the administration towards the better. One of aspect that plays an important role in the decentralization is fiscal decentralization which aims to improve local financial independence in the management and budgeting. Financial aspects have an important role in to increase regional economic growth and reducing disparity in regional income distribution. This study aims to determine the influence of fiscal decentralization on growth and disparity in East Java Province. The analytical method used is the panel data regression with fixed effect model (FEM). The results obtained by the fiscal decentralization and control variables have a positive influence on growth and fiscal decentralization positive effect tends in industrial centers. While the model of the disparity, fiscal decentralization variables had no effect on the disparity and control variables have a positive influence on the disparity and tends to increase the disparity in urban areas.

Key Word: *Fiscal Decentralization, Economic Growth, Disparity*

RINGKASAN

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan dan Kesenjangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014; Devis Fauqiatu Taqwa; 120810101005; 2016; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui desentralisasi dalam era otonomi dirasa lebih baik dan lebih menguntungkan dalam meningkatkan perekonomian daerah karena pembangunan ditekankan pada apa yang dibutuhkan daerah. Berkaitan dengan wewenang desentralisasi ini, pemerintah pusat memberikan fasilitas pendanaan sebagai bentuk transformasi pemerintahan kearah yang lebih baik. Adanya kewenangan disertai dengan pendanaan akan lebih mengoptimalkan desentralisasi yang dilaksanakan sehingga pemerintah daerah dapat lebih mengupayakan pembangunan daerah. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki andil cukup besar dalam perekonomian nasional. Sumbangan perekonomian Jawa Timur terhadap nasional menduduki peringkat kedua setelah Jakarta. Hal ini menunjukkan jika Jawa Timur perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam mengupayakan pembangunan yang lebih baik lagi dengan jalan meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan daerah. Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi akan selalu disertai dengan kesenjangan pendapatan antar daerah dikarenakan tidak semua daerah memiliki pertumbuhan yang merata dan sumber pertumbuhan yang sama. Tentunya hal ini akan mengganggu jalannya desentralisasi sebagai penerapan otonomi daerah di Jawa Timur khususnya dan nasional pada umumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan dan kesenjangan daerah di Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dan menggunakan *fixed effect model* (FEM). Hasil penelitian yang dilakukan pada dua model yaitu pertumbuhan dan kesenjangan, menunjukkan bahwa terhadap model pertumbuhan, variabel independen desentralisasi fiskal

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan nilai probabilitas 0.0000 dan koefisien regresi 32.86927. Variabel kontrol memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan nilai probabilitas 0.0001 dan nilai koefisien regresi 2.969514. Desentralisasi fiskal yang positif ini cenderung mempengaruhi daerah pusat industri dan pusat bisnis. Hasil regresi yang dilakukan pada model kesenjangan menunjukkan jika variabel desentralisasi fiskal bertanda negatif dan tidak memiliki pengaruh terhadap kesenjangan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi (-0.079120) dan nilai probabilitas 0.0729. Sedangkan untuk variabel kontrol memiliki pengaruh positif yang signifikan dengan nilai probabilitas 0.0020 dan koefisien regresi 0.217892. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan ini lebih cenderung terjadi di wilayah perkotaan.

Nilai Uji t pada model pertumbuhan menunjukkan hasil 17.79416 pada variabel desentralisasi fiskal dan nilai 4.113397 pada variabel kontrol yang mana lebih besar daripada t-tabel 1.645 pada tingkat signifikansi 5% sehingga memiliki pengaruh yang signifikan positif. Sedangkan Uji t yang dilakukan pada model kesenjangan menunjukkan hasil variabel desentralisasi fiskal (dalam bentuk log) sebesar -1.805852 yang mana lebih kecil daripada nilai t-tabel sebesar 1.645 sehingga tidak signifikan dengan tanda yang negatif. Untuk Uji t yang dilakukan pada variabel kontrol (dalam bentuk log) menghasilkan nilai t-hitung sebesar 3.146647 yang lebih besar dibanding t-tabel 1.645 sehingga memiliki pengaruh yang signifikan positif.

Nilai Uji F pada model pertumbuhan menunjukkan hasil sebesar 0.000000 yang lebih kecil dibanding nilai signifikansi 5% artinya secara simultan variabel independen baik desentralisasi fiskal maupun variabel kontrol memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan. Nilai Uji F yang dilakukan terhadap model kesenjangan menunjukkan hasil probabilitas statistik sebesar 0.000000 yang lebih kecil dibanding nilai signifikansi 5% sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat secara simultan.

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari pengujian terhadap model pertumbuhan menunjukkan hasil 0.9981. Artinya, variabel desentralisasi fiskal dan belanja daerah dapat menerangkan pertumbuhan sebesar 99.81 persen. Sedangkan sisanya 0,19 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model

penelitian. Untuk pengujian R^2 pada model kesenjangan, diperoleh hasil sebesar 0.602858. Artinya, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 60,28 persen. Dengan demikian, sisanya yaitu 39,78 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.



PRAKATA

Puji syukur atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang di berikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan dan Kesenjangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014” dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Sehingga penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Teguh Hadi P., SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing pertama dan Dr. Siswoyo Hari S., SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat pada penyusunan skripsi ini;
2. Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes, selaku Ketua Jurusan Ilmu Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan;
3. Bapak Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Bapak Edy Santoso selaku Dosen Pembimbing Akademik periode 2013-2014, Prof. Sarwedi (Alm.) selaku Dosen Pembimbing Akademik periode 2014-2015, dan Ibu Dr. Duwi Yunitasari, SE., ME., selaku Dosen Pembimbing Akademik periode 2015-2016 yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Ekonomi
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember, khususnya Jurusan IESP yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis sampai akhir penyelesaian skripsi ini;

6. Ayahanda Alm. Soepardi dan Ibunda Sumini yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa, nasehat dan dukungan yang tiada henti pada penulis sehingga penulis selalu bersemangat dalam meraih cita-cita.
7. Mbakku Sri Lestari, Sulami, dan Almh. Lejarwati yang selalu memberikan wejangan tentang masa depan dan memberikan waktu luang untuk curahan kata yang selalu penulis ungkapkan.
8. Mas Iparku Tukimin yang selalu memberikan nasehat dan selalu mengingatkan untuk tidak meninggalkan kewajiban seorang muslim. Terima kasih untuk diskusi ke-Islamannya, sangat membantu meningkatkan pengetahuan penulis;
9. Keponakanku Qudwah Miftahul Fachrurrozzy, Hasya Rizky Lesmana, dan Muhammad Yusuf Fadillah yang selalu membuat penulis ceria disaat-saat lelah dan tak bersemangat;
10. Adikku tersayang Triana Wahyu Novitasari yang selalu meluangkan waktu untuk curahan hati dan keluh kesah penulis;
11. Keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan semangat kepada penulis;
12. Sahabat-sahabatku tersayang Azizah, Arisna, Andin, dan Ati yang menjadi teman seperjuangan dari sekolah. Terima kasih untuk doa dan dukungan serta canda tawa sehingga hari-hari bersama kalian tidak membosankan;
13. Sahabat-sahabatku Mbak Melda, Mbak Heni, Yusmika, Tiya, Maya, Defi, Dwi, Demy, Fani dan Rosa yang selalu memberikan warna tersendiri di setiap hari yang dilalui penulis;
14. Teman-teman Konsentrasi Regional 2012 yang telah memberikan bantuan, semangat serta menjadi teman seperjuangan penulis dalam diskusi keilmuan;
15. Teman-teman seperjuangan IESP angkatan 2012 yang selalu memberikan bantuan dan semangat;
16. Keluarga Bapak Zainuri yang telah menerima penulis sebagai bagian dari keluarga besarnya dan selalu memberikan bantuan yang sangat berarti kepada penulis ;
17. Keluarga Ibu kos yang telah bersedia menerima penulis sebagai keluarga;

18. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Ibarat pepatah "tak ada gading yang tak retak", penulis menyadari kekurangan yang ada sehingga saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pada kita semua.

Jember, 03 Mei 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Konsep Desentralisasi	10
2.1.2 Desentralisasi Fiskal	13
2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah	18
2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi	25
2.1.5 Distribusi Pendapatan	27
2.1.6 Belanja Daerah	29

2.1.7 Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan	31
2.1.8 Desentralisasi Fiskal dengan Kesenjangan Daerah.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Kerangka Konseptual	37
2.4 Hipotesis	39
BAB 3. METODE PENELITIAN	41
3.1 Rancangan Penelitian	41
3.1.1 Jenis Penelitian	41
3.1.2 Unit Analisis	41
3.1.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.1.4 Metode Analisis	42
a. <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	44
b. <i>Random Effect Model</i> (REM)	45
3.2 Uji Pemilihan Model	47
3.2.1 Uji Hausman	47
3.3 Uji Statistik	47
3.3.1 Uji Parsial (Uji t)	47
3.3.2 Uji Simultan (Uji F)	48
3.3.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	49
3.4 Uji Asumsi Klasik	50
3.4.1 Uji Multikolinearitas	50
3.4.2 Uji Autokorelasi	51
3.4.3 Uji Heterokedastisitas	53
3.4.4 Uji Normalitas	53
3.5 Definisi Operasional	54
BAB 4. PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum	57
4.1.1 Kondisi Geografis Jawa Timur	57
4.1.2 Kondisi Demografis Jawa Timur	58
4.1.3 Kondisi Perekonomian Jawa Timur	59
4.2 Gambaran Variabel Penelitian	61
4.2.1 Desentralisasi Fiskal di Jawa Timur	61

4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur	62
4.2.3 Kesenjangan Daerah Provinsi Jawa Timur	62
4.3 Hasil Analisis Data	63
4.3.1 Hasil Analisis Model Pertumbuhan	63
a. Hasil Uji Hausman	63
b. Analisis Regresi Data Panel	63
c. Uji Statistik	66
d. Uji Asumsi Klasik	68
4.3.2 Hasil Analisis Model Kesenjangan	71
a. Hasil Uji Hausman	71
b. Analisis Regresi Data Panel	71
c. Uji Statistik	74
d. Uji Asumsi Klasik	76
4.4 Pembahasan	80
4.4.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan	81
4.4.2 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Pertumbuhan	82
4.4.3 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesenjangan	82
4.4.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Kesenjangan	83
BAB 5. PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Kriteria Pengujian Durbin Watson	52
Tabel 4.1 Uji Hausman Model Pertumbuhan.....	63
Tabel 4.2 Hasil Regresi Model Pertumbuhan <i>Fixed Effect Model</i>	63
Tabel 4.3 Uji t Model Pertumbuhan	66
Tabel 4.4 Uji F Model Pertumbuhan	67
Tabel 4.5 Uji R ² Model Pertumbuhan	67
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas Model Pertumbuhan	68
Tabel 4.7 Uji Park Model Pertumbuhan	69
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi Model Pertumbuhan	69
Tabel 4.9 Uji Hausman Model Kesenjangan	71
Tabel 4.10 Hasil Regresi Model Kesenjangan <i>Fixed Effect Model</i>	72
Tabel 4.11 Uji t Model Kesenjangan	75
Tabel 4.12 Uji F Model Kesenjangan	75
Tabel 4.13 Uji R ² Model Kesenjangan	76
Tabel 4.14 Uji Multikolinearitas Model Kesenjangan	77
Tabel 4.15 Uji Park Model Kesenjangan	78
Tabel 4.16 Uji Autokorelasi Model Kesenjangan	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PDRB Tahun 2010-2014 di 6 Provinsi Pulau Jawa	4
Gambar 1.2 Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014	5
Gambar 1.3 Indeks Gini Provinsi Jawa Timur	6
Gambar 2.1 Kurva rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional berdasarkan Hukum Wagner	21
Gambar 2.2 Perkembangan pengeluaran pemerintah	24
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Konseptual	39
Gambar 3.1 Aturan Tabel Durbin Watson	52
Gambar 4.1 Grafik Proyeksi Penduduk Jawa Timur (2010-2014)	58
Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Tahun 2010-2014	60
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Model Pertumbuhan	70
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas Model Kesenjangan	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Penampang Permukaan Kabupaten/Kota Jawa Timur	91
Lampiran B. PDRB Jawa Timur (Juta Rupiah)	92
Lampiran C. Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur (Juta Rupiah)	93
Lampiran D. Belanja Daerah Jawa Timur (Juta Rupiah)	94
Lampiran E. Laju PDRB ADHK 2010 Jawa Timur	95
Lampiran F. Indeks Gini Jawa Timur	96
Lampiran G. Data Regresi Model Pertumbuhan (setelah diolah)	97
Lampiran H. Data Regresi Model Kesenjangan (setelah diolah)	102
Lampiran I. Hasil Regresi Data Panel	107
Lampiran J. Hasil Uji Hausman.....	115
Lampiran K. Hasil Uji Asumsi Klasik	117

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia dilakukan melalui otonomi daerah sehingga dapat menjadi sumber kekuatan pembangunan karena berdasarkan apa yang dibutuhkan. Secara langsung, penerapan otonomi daerah ini disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Sesuai dengan pendapat Pujiati (2008) penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Prinsip pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa kini, titik berat pemberian otonomi daerah diharapkan lebih kepada pemerintah daerah tingkat II dan bukan kepada pemerintah daerah tingkat I. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan di samping membina, kestabilan sosial, politik, ekonomi, dan kesatuan bangsa. Pemerintah daerah dipandang sebagai mitra pemerintah pusat dalam penyelenggaraan berbagai tugas pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah tingkat II dianggap sebagai pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga mengetahui dan mengenal kebutuhan-kebutuhan sebenarnya dari masyarakat daerahnya.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan atas: azas otonomi desentralisasi, dekonsentrasi, Instansi Vertikal dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi dalam UU ini menganut pengertian bahwa penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan strategi yang sangat tepat dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan daerah sesuai dengan

perkembangan dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang sedang belajar dan mengembangkan demokrasi diberbagai segi. Salah satu aspek yang dijadikan perhatian dalam pelaksanaan azas desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Karena pada umumnya, otonomi daerah diikuti dengan kebijakan fiskal sebagai instrumen dalam mendukung daerah di dalam pelayanan publik dan transfer dana ke daerah. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal ini pemerintah diberi kebebasan untuk menyusun sendiri program-program kerja dan merealisasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal ini menekankan pada aspek pembiayaan pengembangan daerah yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Sumber pembiayaan era desentralisasi fiskal tidak diserahkan wewenangnya begitu saja pada pemerintah daerah, akan tetapi masih ada kontribusi pemerintah pusat. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dalam membantu meningkatkan pembangunan di daerah. Sehingga secara nyata peran pemerintah pusat masih ada.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari Pendapatan daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Sedangkan Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Daerah, penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

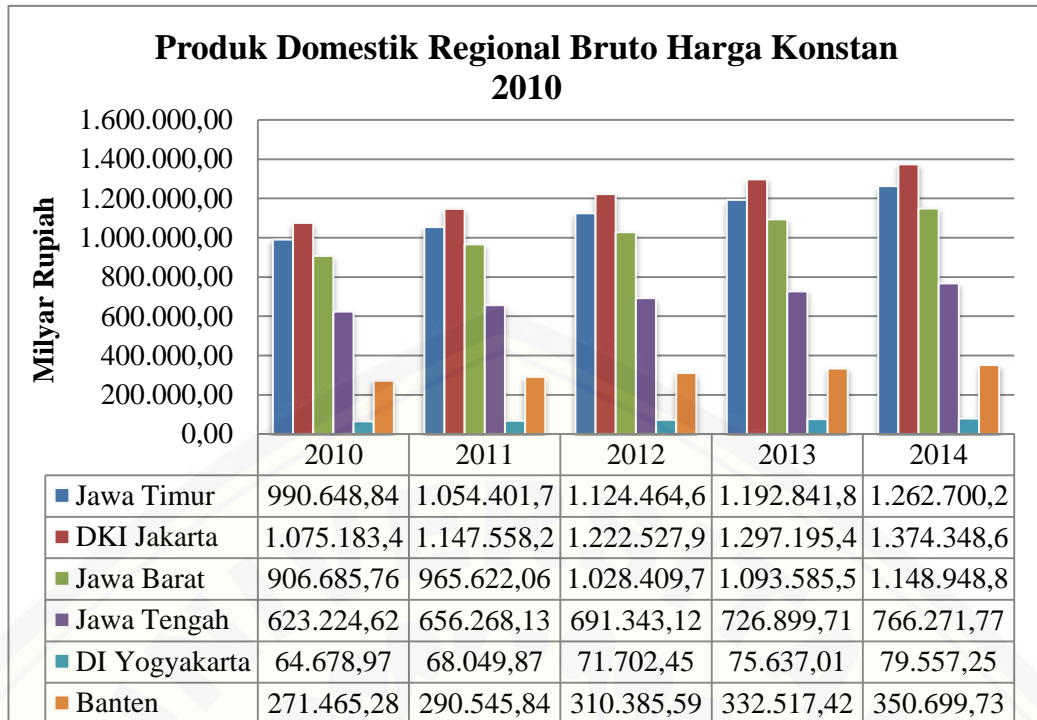
Berkaitan dengan kebijakan fiskal daerah, adanya otonomi daerah menyebabkan adanya perubahan dalam komposisi keuangan daerah dengan menambahkan unsur dana perimbangan dalam APBD. Pada pelaksanaannya, timbul permasalahan antara pusat dan daerah berkaitan dengan keadilan transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah. Saragih (2003) menyatakan dalam menyikapi hal ini, pemerintah pusat memutuskan untuk menerapkan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah (*inter-governmental transfer system*) dalam UU Otonomi Daerah melalui tiga pendekatan yang umum dilakukan oleh banyak negara yakni:

1. Pendekatan berdasarkan presentase
2. Pendekatan berdasarkan formula
3. Pendekatan berdasarkan kebutuhan yang bersifat khusus atau insidental.

Pada dasarnya, pembangunan yang berbasis otonomi daerah ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan melalui kreativitas yang dapat ditonjolkan dari potensi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber daya serta pembangunan daerah. Menurut Laode Ida dalam Saragih (2003) mengemukakan bahwa sedikitnya ada tiga esensi dari otonomi daerah. Pertama, pengelolaan kekuasaan berpusat pada tingkat lokal yang berbasis pada rakyat. Kedua, dimensi ekonomi. Artinya dengan otonomi daerah, maka daerah-daerah diharapkan mampu menggali dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayahnya. Adanya kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri paling tidak memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Ketiga, dimensi budaya. Artinya dengan otonomi daerah masyarakat lokal harus diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam mengembangkan kebudayaan lokal. Disinilah pentingnya memikirkan kembali strategi pembangunan secara mendasar, yakni pada upaya membangun ekonomi berbasis komunitas lokal.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya tentang pelaksanaan desentralisasi dalam era otonomi, Indonesia perlu mengembangkan perekonomian yang berbasis pada kekuatan daerah sehingga pengoptimalan akan sektor riil menjadi sangat penting. Menurut Damanhuri dan Findi (2014) yang perlu ditekankan dalam perekonomian adalah bagaimana mengaktifkan sektor riil sehingga memiliki peran langsung dalam pembangunan. Selain itu perlu mendorong investasi agar dapat terealisasi, mengurangi pengangguran, perlunya intermediasi perbankan, serta sistem keamanan dan perlindungan hukum yang pasti dalam berwirausaha.

Berkaitan dengan potensi investasi, Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi investasi cukup besar dibandingkan daerah lain. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang selalu positif merupakan daya tarik bagi investor. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dilihat pada grafik Produk Domestik Regional Bruto dibawah ini:



Gambar 1.1 PDRB Tahun 2010-2014 di 6 Provinsi Pulau Jawa (Sumber: BPS, data diolah, 2016)

Desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup signifikan. Dari Gambar 1.1 diketahui jika Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan nasional. Berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta, nilai PDRB Jawa Timur terus meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Berikut pula diikuti dengan total nilai perolehan PDRB secara nominal yang sangat tinggi dibanding dengan provinsi lain. Pertumbuhan PDRB yang positif dengan kecenderungan yang terus meningkat ini menjadi cerminan jika pengembangan potensi daerah dapat diwujudkan sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Jawa Timur 2009-2014.

Dalam RPJMD Jawa Timur yang membahas strategi pembangunan dijelaskan untuk mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014 tersebut dilakukan melalui empat strategi pokok pembangunan:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based*

development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri

2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro-poor*)
3. Pengarusutamaan gender
4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama, pengembangan agroindustri/agrobisnis.

Pendapatan daerah diimbangi dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat sebagai wujud konsistensi pemerintah pusat menjalankan otonomi daerah. Dana perimbangan ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan yang mungkin akan terjadi. Akan tetapi dana perimbangan juga mengindikasikan jika suatu daerah belum dapat dinilai mandiri secara fiskal. Kebutuhan akan dana tranfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi meskipun desentralisasi sudah berjalan selama ini, seperti yang terlihat pada gambar 1.2:

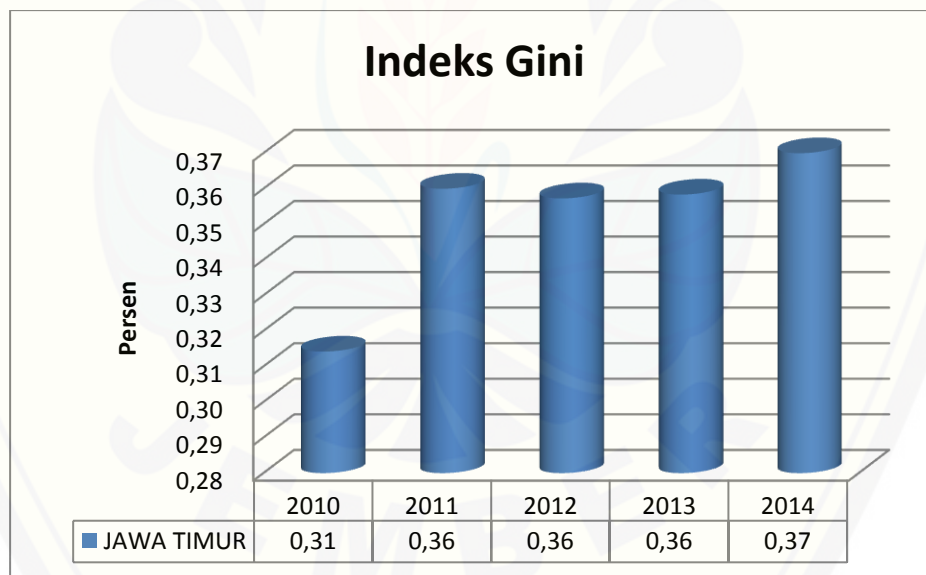


Gambar 1.2 Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 (Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, data diolah 2016)

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat jika kebutuhan dana perimbangan Provinsi Jawa Timur semakin meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidakmampuan Provinsi Jawa Timur dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dengan

mengoptimalkan potensi daerah. Sehingga indikasi kemandirian fiskal menjadi sangat minim dan tergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Pertumbuhan yang terjadi pada negara berkembang khususnya tidak selalu dapat secara otomatis menghilangkan ketimpangan yang ada dalam pembangunan. Ketimpangan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tidak serta merta dapat hilang meskipun telah ada desentralisasi fiskal yang seharusnya membawa dampak positif untuk pertumbuhan. Penerapan desentralisasi fiskal yang sudah terjadi justru semakin memperlebar jurang kesenjangan yang ada. Penurunan wewenang kekuasaan untuk pengoptimalan potensi daerah sebagai sumber pendapatan, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah semakin berkurang. Sebagai akibatnya ketimpangan antar daerah tidak dapat dihindari dan berdampak lebih luas terhadap distribusi pendapatan yang semakin tidak merata.



Gambar 1.3 Indeks Gini Provinsi Jawa Timur (Sumber: BPS data diolah , 2016)

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, terlihat jika ketimpangan Provinsi Jawa Timur meningkat dari tahun 2010 dengan nilai indeks sebesar 0,31 menjadi 0,36 pada tahun 2011 dan nilai ini konstan selama 3 tahun. Peningkatan indeks sebesar 0,01 terjadi di tahun 2014 menjadi 0,37. Kenaikan indeks gini ini mencerminkan

jika ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan.

Dalam realitas fisiknya, Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki keanekaragaman dan persebaran yang sangat luas. Kontur geografi yang berbeda ini mengakibatkan perbedaan potensi daerah yang ada di Jawa Timur. Keanekaragaman geografis ini tercermin dalam perbedaan kondisi sosial ekonomi yang cukup signifikan. Perbedaan ini terlihat pada PDB per kapita daerah sangat bervariasi, angka kemiskinan bervariasi antar daerah yang satu dengan yang lain pada tingkat kabupaten/kota, pengangguran yang juga turut menyumbang kondisi sosial ekonomi sampai saat ini belum juga dapat ditangani. Sedangkan tingkat pendidikan menjadi permasalahan tersendiri berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatannya membuat pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang dapat menguntungkan daerahnya. Salah satunya adalah kemudahan akses swasta yang dianggap dapat menggairahkan perekonomian melalui investasi. Pada kenyataannya, peran swasta di Jawa Timur dikhususkan pada daerah yang benar-benar memiliki potensi pengembangan baik dilihat dari segi sumber daya alam maupun kualitas modal manusianya. Pada akhirnya, peran swasta tidak dapat merata karena pengkutuban kegiatan perekonomian pada lokasi tertentu. Hal ini berdampak pada kurang keadilan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dikaji lebih mendalam mengenai penerapan desentralisasi fiskal serta pengaruhnya terhadap indikator pembangunan untuk mengetahui seberapa efektifkah penerapan fiskal yang sudah dijalankan selama ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui jika penerapan desentralisasi fiskal saat ini masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas, mengingat dampak desentralisasi fiskal tidak cukup menguntungkan khususnya daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan tumpuan dalam kegiatan perekonomian. Meskipun terdapat dana transfer dari pemerintah pusat,

desentralisasi fiskal tidak serta merta efektif meningkatkan perekonomian. Hal ini disebabkan karena permasalahan kelembagaan dalam era desentralisasi ini meningkatkan praktek korupsi lebih luas. Adanya pertumbuhan daerah belum menjamin jika pemerataan pertumbuhan dapat tercapai. Sebagai akibatnya, kesenjangan pendapatan antar daerah semakin tinggi. Kebijakan pemanfaatan potensi oleh pemerintah daerah dalam bentuk regulasi bagi pihak swasta juga menjadi permasalahan mengenai pemerataan pertumbuhan. Hal ini membuktikan jika desentralisasi fiskal tidak selalu memiliki dampak yang positif pada pertumbuhan, selain itu masalah kesenjangan membutuhkan perhatian yang serius untuk segera ditangani. Apabila kesenjangan yang terjadi antara daerah semakin lebar, tentunya akan menghambat implikasi desentralisasi fiskal sebagai jalan penerapan otonomi daerah. Sehingga rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang yaitu “Bagaimana Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indikator Pembangunan Ekonomi yakni Pertumbuhan dan Kesenjangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap indikator pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014.
2. Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap indikator pembangunan ekonomi yaitu kesenjangan daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat sebagai penambah wawasan mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap indikator pertumbuhan sehingga dapat meningkatkan kreativitas individu sesuai dengan perannya dalam perekonomian terutama dalam pemanfaatan potensi otonomi daerah sebagai

peningkatan pembangunan ekonomi perkapita sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Jawa Timur.

2. Bagi pemerintah daerah sebagai rekomendasi dalam penentuan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Jawa Timur.
3. Bagi ilmu pengetahuan sebagai sumbangsih wawasan mengenai pentingnya pelaksanaan desentralisasi fiskal di era otonomi daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah dan peningkatan kemandirian daerah.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Desentralisasi

Pembangunan daerah dipandang merupakan strategi atau cara yang paling efektif dibandingkan strategi pembangunan yang bersifat sentralistis yang dilakukan oleh pusat sebelum periode otonomi daerah mulai berlaku. Hal ini dimungkinkan karena adanya peningkatan pendapatan daerah selama berlakunya otonomi. Perubahan tatanan pemerintahan menjadi desentralisasi ada beberapa alasan yang mendasarinya seperti yang dikemukakan Sjafrizal dalam Nurman (2013) bahwa sentralisasi yang demikian besarnya ternyata telah menimbulkan permasalahan pembangunan yang sangat serius. Pertama, proses pembangunan daerah secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan ketimpangan wilayah semakin besar. Keadaan tersebut terjadi karena sistem pembangunan yang terpusat cenderung mengambil kebijakan yang seragam dan mengabaikan perbedaan potensi daerah yang sangat besar. Dengan demikian banyak potensi daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, daerah yang potensinya sesuai dengan prioritas pembangunan nasional akan bertumbuh cepat. Sedangkan daerah yang potensinya tidak sesuai dengan prioritas pembangunan nasional akan cenderung tertekan pertumbuhan ekonominya. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung melebar yang selanjutnya cenderung pula mendorong terjadinya keresahan sosial daerah. Kedua, sistem pembangunan yang sangat terpusat menimbulkan ketidakadilan yang sangat besar dalam alokasi sumber daya nasional, terutama dana pembangunan. Keadaan tersebut terlihat dari banyaknya provinsi yang kaya sumber daya alam, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakatnya ternyata masih sangat rendah dan ketinggalan dibandingkan dengan daerah lainnya.

Menurut Sjafrizal (2014), Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan yang selama ini cenderung seragam, mulai berubah dan cenderung

bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan daerah selama ini hanya merupakan pendukung dari kebijakan nasional, mulai mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang di daerah.

Kebijakan pembangunan yang diserahkan pada daerah dalam kerangka otonomi ini sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- a. Politik, pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah.
- b. Teknokratik, perencanaan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
- c. Partisipatif, Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki dan untuk mendapatkan aspirasi.
- d. Atas-bawah (*top-down*) dan Bawah-atas (*bottom-up*), pendekatan perencanaan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Menurut Saragih (2003), dimensi otonomi daerah tentu tidak hanya sekedar pelimpahan sebagian wewenang penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Dimensi ekonomi otonomi daerah sangat luas. Karena tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik materi maupun psikis. Dampak politik otonomi daerah adalah semakin dekatnya masyarakat lokal dengan pemerintah daerahnya dan kecenderungan meningkatnya peran masyarakat dalam pengambilan putusan politik oleh lembaga perwakilan daerah (DPR). Oleh sebab itu, seiring dengan upaya membangun ekonomi lokal lewat desentralisasi, pengembangan institusi masyarakat (*institutional empowerment*) sangat penting, termasuk pemberdayaan DPRD di masa depan.

Pendapat Saragih (2003) diatas didukung dengan tujuan SPPN dalam pembangunan era otonomi daerah. Tujuan dilaksanakannya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 yaitu:

- a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Secara harfiah kata desentralisasi adalah lawan kata dari sentralisasi yang dapat diartikan sebagai suatu pemusatan (*adjective*) berkaitan dengan suatu kewenangan (*authority*) pemerintahan. Desentralisasi mengenai kewenangan pemerintahan menyangkut beberapa aspek misalnya bidang politik, urusan pemerintahan, sosial dan pembangunan ekonomi dan aspek fiskal (Rahayu,2010).

Menurut Syarif dalam Sjafrizal (2014) Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut. Pertama, adalah *Political Equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan negara. Kedua, adalah *Local Accountability* yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah. Ketiga adalah *Local Responsiveness* yaitu meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.

Penguatan ekonomi daerah yang diimplementasikan melalui desentralisasi fiskal memiliki kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah sehingga pemerintah daerah harus lebih berperan dalam peningkatan manajemen keuangan daerah. Hal ini berkaitan dengan kemandirian daerah dalam mengelola aspek

fiskal sebagai instrumen desentralisasi yang diturunkan dari pemerintah pusat. Implikasi desentralisasi fiskal tidak hanya merupakan dampak positif yang menguntungkan akan tetapi juga dampak negatif yang merugikan. Apabila tidak disikapi dengan sistem kelembagaan yang baik, dampak positif yang diharapkan dapat menjadi dampak negatif dan berakibat pada negara secara keseluruhan.

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab disertai perimbangan keuangan pusat-daerah merupakan suatu proses dengan banyak segi. Otonomi daerah mencakup banyak aspek yang masing-masing saling berkaitan dan melibatkan beberapa variabel, seperti aspek keuangan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), administrasi, aparatur, ekonomi swasta, potensi sumber daya alam, kondisi demografis, dan partisipasi masyarakat (Saragih,2003).

Salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagai sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikan peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan/atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi wewenang (otonomi) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain yang juga penting adalah kemampuan mereka untuk meningkatkan penerimaan mereka (PAD). Tetapi desentralisasi fiskal bukanlah semata-mata peningkatan PAD saja akan tetapi lebih dari itu adalah kewenangan dalam mengelola potensi daerah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, banyak terjadi pemahaman desentralisasi fiskal oleh beberapa elit di daerah yang mengartikan secara sempit, yaitu hanya semata-mata meningkatkan PAD saja. Hal ini tentu pengertian yang salah dan justru akan menimbulkan distorsi bagi perekonomian di daerah.

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di

sektor publik, maka mereka harus di dukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat (Khusaini, 2006).

Berdasarkan pendapat Akai dan Sakata (2002), secara umum desentralisasi fiskal diinterpretasikan sebagai transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Untuk mengukur desentralisasi fiskal, kita harus mengetahui derajat kewenangan pemerintah lokal dalam mengambil keputusan atau tingkat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah yang lebih rendah. Kewenangan berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam masalah pengalokasian yang berbasis pada hubungan legal antara tingkat pemerintahan yang lebih rendah dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Pendekatan standar untuk mengukur alokasi kewenangan adalah dengan menggunakan pengukuran perhitungan seperti pendapatan atau pengeluaran. Bagaimanapun terdapat beberapa cara untuk mendapatkan ukuran yang tepat dalam alokasi kewenangan.

Pertama, pengeluaran pemerintah tingkat rendah bisa saja dibiayai oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Pembagian pengeluaran ini dalam total anggaran tidak dengan sendirinya merefleksikan tingkat alokasi kewenangan kepada pemerintahan yang lebih rendah karena, dalam arti lebih luas, pemberian ini dianggap pengeluaran yang diizinkan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Adalah tidak tepat untuk menganggap pembagian pengeluaran sebagai sesuatu yang penting dalam mengukur pembagian kewenangan. Hal ini terjadi karena pembagian kewenangan selalu diasosiasikan dengan pengeluaran biaya yang diberikan pada pemerintahan yang lebih rendah. Kedua, jika pembagian keuangan atau pendapatan kecil, maka kewenangan fiskal menjadi terdesentralisasi untuk menyediakan sumber daya bagi belanja publik yang dialokasikan kepada pemerintah tingkat bawah, dengan hal tersebut maka otonomi tercapai.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari diterapkan kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah *Money Follow Function*, artinya

penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Perimbangan keuangan dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi. Masalah keseimbangan anggaran menjadi masalah serius karena banyak pemerintah pusat tidak mengizinkan pemerintah daerah untuk melakukan utang kepada publik (Waluyo,2007).

Prinsip-prinsip pembiayaan fungsi pemerintahan di daerah Dasar-dasar pembiayaan pemerintahan daerah dilakukan menurut hubungan fungsi berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antar tingkat pemerintahan. Penyelenggaraan tugas Daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi menjadi beban APBD, sedangkan tugas Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dibiayai dari APBN (Surtikanti, 2013).

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengandung pokok-pokok muatan sebagai berikut:

1. Penegasan Prinsip-Prinsip Dasar Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
2. Penambahan Jenis Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Pertambangan Panas Bumi, PPh Pasal 25/29 dan PPh Pasal 21
3. Pengelompokan Dana Reboisasi yang semula masuk dalam Komponen DAK menjadi DBH
4. Penyempurnaan Prinsip Pengalokasian DAU
5. Penyempurnaan Prinsip Pengalokasian DAK
6. Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme Pinjaman Daerah termasuk Obligasi Daerah
7. Pengaturan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan
8. Penegasan Pengaturan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
9. Penambahan Pengaturan Hibah dan Dana Darurat
10. Prinsip Akuntabilitas dan Responsibilitas dipertegas dengan pemberian sanksi.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 ini diatur tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berdasarkan atas hubungan fungsi, yaitu berupa sistem keuangan daerah yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antar tingkat pemerintahan sesuai dengan pengaturan pada UU tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah menjadi unsur utama dalam kebijaksanaan ini. Keseimbangan yang dimaksud yaitu adanya dana perimbangan yang diperoleh daerah dari Pemerintah Pusat. Skema transfer yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat selama era desentralisasi fiskal ini mempengaruhi pendapatan daerah. Dalam sisi komposisi pembiayaan daerah, terutama dalam penyusunan APBD, dana perimbangan menjadi sumber pendanaan yang dibutuhkan daerah terutama untuk membiayai kebutuhan khusus.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan yang berasal dari dana alokasi khusus berasal dari dana APBN kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana APBN. Pembiayaan kebutuhan khusus diisyaratkan dana pendamping dari APBD. Kebutuhan khusus yang dimaksud disini adalah:

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, antara lain kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, misalnya pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan atau
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Disamping dana PAD dan Perimbangan Keuangan, daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau luar negeri melalui pusat untuk membiayai sebagian anggarannya yang pengaturannya dilakukan lebih lanjut melalui Pemerintah. Daerah dapat juga memperoleh Dana Darurat, yaitu dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk keperluan mendesak, misalnya jika terjadi bencana alam, dan sebagainya. Pengaturan lebih lanjut dari Dana Darurat ini dilakukan melalui Peraturan Pemerintah.

Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang mengikuti ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan telah memungkinkan

munculnya ketimpangan fiskal antar daerah. Daerah kaya akan mendapatkan dana fiskal yang semakin besar, sedangkan daerah yang miskin akan mendapatkan bagian yang semakin kecil. Perlu ditinjau kembali dasar-dasar penetapan perimbangan keuangan dan perolehan dana DAU. Kasus tentang Bali dan DIY yang miskin sumber daya alam otomatis akan mendapat DAU yang kecil, tetapi kedua provinsi tersebut mempunyai sumber daya jasa yang memadai tetapi tidak pernah diperhitungkan dalam DAU (Surtikanti, 2013).

Dalam teori, transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengurangi tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dalam menangani kebijakan fiskal. Dengan kata lain, proporsi total pengeluaran pemerintah daerah meningkat secara signifikan. Kesempatan ini memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen kebijakan fiskal secara umum. Jika desentralisasi fiskal ini ditangani dengan baik, akan memberikan dampak positif terhadap kemakmuran dan pelayanan publik. Dan sebaliknya, jika tidak ditangani dengan baik, desentralisasi fiskal menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi, kesenjangan antar daerah, dan kualitas pelayanan publik yang buruk (Surya, 2012).

Desentralisasi fiskal ini untuk memudahkan pengorganisasian penggunaan dana yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. Tujuan secara langsung desentralisasi fiskal yakni memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional dengan cara pengaturan kembali dalam pengeluaran, penerimaan, dan transfer fiskal antar tingkatan pemerintahan. Dana perimbangan merupakan unsur utama dari rancang bangun desentralisasi. Hal ini terdiri dari beberapa dana transfer yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan pengeluaran dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar pemerintah kabupaten/kota mampu menyediakan layanan masyarakat yang sudah didesentralisasikan, dalam hal kualitas maupun kuantitas, dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Apabila kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan secara umum dengan pandangan setiap daerah mendapat perlakuan yang sama, tentunya akan menguntungkan daerah yang memiliki sumber daya alam potensial karena mendapat tambahan keuangan daerah dari pemerintah pusat selain dari keuangan daerah yang bersangkutan.

Dengan kata lain, daerah yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya, daerah yang miskin akan semakin miskin.

2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Peran pemerintah mutlak diperlukan dalam mengatur kegiatan ekonomi suatu negara. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan dan mustahil untuk dicegah. Dalam perekonomian saat ini, peran pemerintah dipilah menjadi empat peran yaitu (Dumairy, 1996):

- a. Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kegagalan pasar dan eksternalitas merupakan salah satu contoh permasalahan dalam perekonomian yang memerlukan campur tangan pemerintah. Peran alokatif ini tidak hanya sekedar melibatkan peran pemerintah sebagai pelindung masyarakat tapi juga menuntut pengeluaran biaya. Peran pemerintah sangat besar terutama di negara berkembang karena pemerintah bertindak sebagai pelopor dan pengendali pembangunan.
- b. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Kepemilikan sumber daya sering tidak merata baik antar tingkatan lapisan masyarakat, secara sektoral maupun antar wilayah dalam suatu negara. Hal ini dapat berakibat pada instabilitas nasional sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan. Berkaitan dengan peran distributif pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan maupun jalur pengeluaran. Sisi penerimaan pemerintah memungut pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian didistribusikan secara adil dan proporsional serta dengan pola serupa pemerintah membelanjakan pengeluarannya.
- c. Peran stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada pada keadaan disequilibrium. Isu stabilisasi merupakan salah satu alasan yang mendasari perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan swasta dalam menghadapi masalah nasional yang menghambat dalam kegiatan perekonomian seperti inflasi, resesi atau bahkan impor yang berlebih

dikarenakan swasta tidak memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

- d. Peran dinamisatif, peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Peran ini sangat penting ketika menghadapi permasalahan perekonomian di negara berkembang yang kurang berani dalam memulai sebuah usaha sehingga pemerintah berperan untuk mendorong kegiatan ekonomi agar lebih maksimal. Misalnya dengan memindahkan pusat kegiatan ke lokasi yang baru atau dengan mengoptimalkan anggaran pada sektor yang ingin dikembangkan pada daerah tertentu.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Secara umum pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai, pengeluaran yang bersumber dari kas pemerintah yang bertujuan untuk memperlancar pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah bisa berupa, penyediaan lapangan kerja, pembayaran gaji pegawai, penyediaan infrastruktur, pembelian perlengkapan bersenjata, dll. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pembayaran gaji pegawai, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat dapat terus melakukan kegiatan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur akan berpengaruh baik terhadap kelancaran kegiatan investasi, dengan adanya infrastruktur yang memadai dalam suatu wilayah, maka para investor tidak akan ragu lagi untuk menanamkan modalnya pada wilayah tersebut. Maka dapat diartikan, jika pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kegiatan investasi (Qoyimah, 2014).

Menurut Sasana (2008) pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu untuk menjalankan sektor yang tidak dilakukan oleh sektor swasta seperti memproduksi barang publik. Dalam memproduksi barang publik memerlukan dana yang terwujud dalam pengeluaran pemerintah baik level nasional maupun daerah. Pengeluaran pemerintah harus dilihat secara utuh untuk mengetahui pengaruh atau timbal balik pengeluaran terhadap perekonomian. Keynes menyatakan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat mendorong pengeluaran agregat saat kondisi daya beli masyarakat sedang

menurun. Diasumsikan pengeluaran pemerintah dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan seperti biasanya.

Keynes membagi pengeluaran agregat menjadi dua yang merupakan pengeluaran yang sangat berpengaruh. Pengeluaran tersebut adalah pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran perusahaan untuk investasi. Melihat kondisi saat ini, pengeluaran pemerintah dan ekspor memiliki andil yang cukup besar dalam pengeluaran agregat. Pengeluaran pemerintah dalam perekonomian terbuka 3 sektor dapat mempermudah sirkulasi perekonomian karena pengeluaran pemerintah berfungsi untuk mengatur kegiatan perekonomian (Sukirno, 2013).

Identitas keseimbangan nasional $Y = C + I + G + X - M$ merupakan pandangan *Keynesian* tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Notasi tersebut menjelaskan bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak hanya cukup meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah juga harus menghindari perannya tidak melemahkan swasta (Dumairy, 1996).

Wagner mengemukakan teori pengeluaran yang dinilai secara relatif sebagaimana teori musgrave, maka dalam perekonomian pendapatan relatif searah dengan pengeluaran. Apabila ada peningkatan dalam pendapatan perkapita maka, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum ini didasarkan pada pengamatan empiris negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang akan tetapi hukum wagner memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas (Tandiawan, *et.al*, 2015).

Temuan Adolph Wagner tersebut dinamakan “hukum pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat” (*law of growing public expenditure*) oleh Richard A. Musgrave. Sedangkan Wagner menamakannya “hukum aktivitas

pemerintah yang selalu meningkat” (*law of ever increasing state activity*). Hukum tersebut dapat ditulis sebagai berikut (Dumairy, 1996):

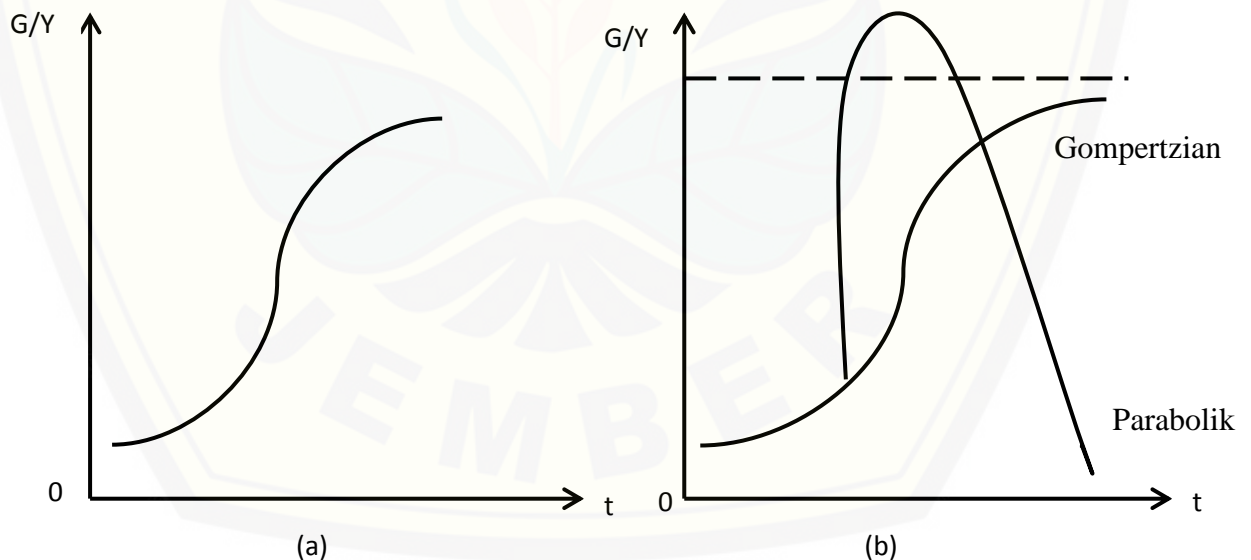
$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} > \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

GpC = pengeluaran pemerintah per kapita

YpC = produk atau pendapatan nasional per kapita

t = indeks waktu

Wagner menjelaskan ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab yang dimaksud adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan. Rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional dapat ditunjukkan oleh kurva berikut:



Gambar 2.1 Kurva rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional, berdasarkan Hukum Wagner.

Pada Gambar 2.1 (a) di atas menjelaskan jika pengeluaran pemerintah berdasarkan waktu akan selalu meningkat seiring waktu. Bentuk yang

eksponensial dalam jangka panjang akan mencapai batas maksimum. Sedangkan Gambar 2.1 (b) adalah kurva yang masih dalam perdebatan artinya apakah pengeluaran pemerintah akan berpola Gompertzian yang berarti akan terdapat batas maksimum tertentu pada rasio G/Y. Ataukah akan berpola parabolik yang berarti jika sampai pada suatu titik tertentu rasio G/Y akan menurun.

Rasio pengeluaran pemerintah yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional sesuai dengan pendapat Sukirno (2010) bahwa pendapatan yang diterima oleh pemerintah yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Di beberapa negara maju, pajak adalah sumber utama bagi perbelanjaan pemerintah. Diantaranya digunakan untuk membayar gaji pegawai, membiayai sistem pendidikan, perbelanjaan angkatan bersenjata, dan berbagai jenis infrastruktur. Penentu-penentu yang berpengaruh dalam pengeluaran pemerintah adalah:

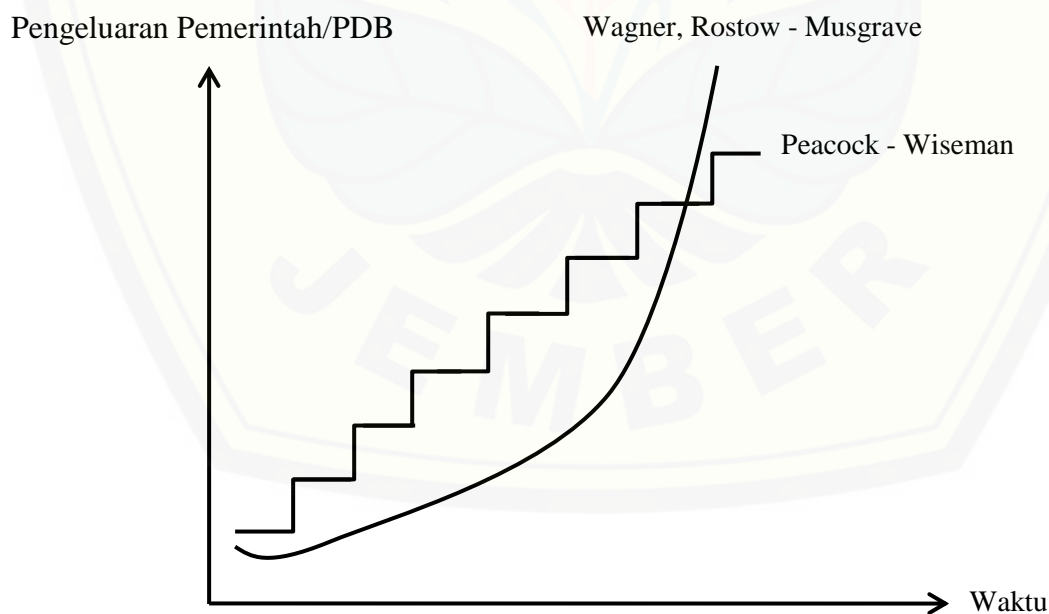
1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima, pajak merupakan faktor penting dalam penentuan seberapa besarnya jumlah pengeluaran yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, untuk dapat memperkirakan seberapa besar pengeluaran yang akan dilakukan, pemerintah harus meramalkan seberapa besar jumlah pajak yang akan diterima. Makin banyak jumlah pajak yang dikumpulkan, makin banyak pengeluaran yang akan dilakukan oleh pemerintah.
2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, dalam penentuan pengeluaran pemerintah, diperlukan tujuan secara jelas yang ingin dicapai. Pemerintah memerankan tokoh penting dalam perekonomian. Kegiatan perekonomian dapat diatur kearah yang diinginkan. Beberapa tujuan dari pembangunan adalah mengatasi pengangguran, inflasi, dan mempercepat pembangunan perekonomian jangka panjang. Untuk tujuan-tujuan tersebut, pemerintah sering membelanjakan uang jauh lebih besar dari pada pendapatan yang diterima. Pada akibatnya, kebutuhan dana akan semakin besar dan tidak dapat terpenuhi dari pendapatan pajak saja, kemudian pemerintah mencanangkan peminjaman atau bahkan mencetak uang untuk menutupi kekurangan tersebut.
3. Pertimbangan politik dan keamanan, pertimbangan politik dan kestabilan negara menjadi salah satu tujuan penting dalam penentuan anggaran belanja.

Hal ini dikarenakan, apabila kestabilan negara terganggu, maka pemerintah akan membelanjakan uang yang lebih besar khususnya untuk kebutuhan belanja dalam operasi militer.

Rostow mengemukakan model pertumbuhan yang bertahap. Tahapan pertumbuhan ini merupakan proses perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan yang dilalui oleh semua negara. Berkaitan dengan model tahap pembangunan tersebut, Rostow dan Musgrave menghubungkan dengan pengeluaran pemerintah. Tahapan tersebut dibedakan menjadi tahapan awal, tahapan menengah, dan tahapan lanjut. Pada tahap awal, investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat dominan dengan jumlah yang sangat besar. Hal ini dikarenakan pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Pada tahap kedua adanya pergeseran pengeluaran pemerintah karena investasi yang dilakukan oleh swasta. Akan tetapi dalam tahap ini tetap pemerintah memiliki peran yang sangat besar untuk menghindari adanya praktek monopoli oleh swasta selain itu juga untuk mengantisipasi dampak eksternalitas dan kegagalan pasar. Pada tahap ini, investasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Pada tahap selanjutnya, peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana beralih menjadi pengeluaran yang bersifat sosial yang bertujuan untuk melayani masyarakat (Suryanto, 2011).

Menurut Peacock dan Wiseman dalam Dumairy (1996) menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah berdasarkan analisis “dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah”. Pemerintah akan selalu memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan pajak sementara dilain sisi masyarakat tidak ingin pembebanan pajak yang terlalu tinggi. Batas toleransi pemahaman masyarakat atas pajak yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah merupakan kendala yang membatasi pemerintah dalam menaikkan pungutan pajak. Akan tetapi, berkaitan dengan perkembangan perekonomian yang terjadi, Peacock dan Wiseman berpendapat jika kenaikan pungutan pajak dapat terjadi meskipun dengan tarif yang tetap sehingga dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah. Jadi dalam kondisi normal, dapat dikatakan jika kenaikan pendapatan nasional akan meningkatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Dalam waktu tertentu, ada keadaan dimana kondisi normal tersebut terganggu, yang mengakibatkan pemerintah harus meningkatkan pengeluarannya misalnya dikarenakan perang untuk mengatasi gangguan tersebut maka menimbulkan konsekuensi tuntutan penerimaan pajak yang besar. Pajak yang besar berakibat pada menurunnya investasi dari pihak swasta sehingga kebutuhan pembangunan dibiayai oleh pemerintah menggunakan dana bantuan berupa pinjaman dari luar negeri. Setelah kondisi stabil, maka pemerintah harus mengembalikan pinjaman tersebut sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pengeluaran pemerintah. Sebagai akibatnya, kenaikan pajak diawal tidak dapat kembali pada tingkat semula meskipun kondisi telah kembali normal. Hal ini juga sebagai akibat kesadaran masyarakat akan kebutuhan pengeluaran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga masyarakat bersedia meningkatkan pembayarannya. Dalam grafik, dialektika ini digambarkan dengan bentuk kurva berlereng positif yang patah-patah dan bertingkat menyerupai tangga. Perbandingan perkembangan pengeluaran pemerintah menurut Peacock - Wiseman serta Rostow - Musgrave dan Wagner dapat dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Perkembangan pengeluaran pemerintah berdasarkan pendapat Rostow - Musgrave, Wagner, dan Peacock - Wiseman

2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran dalam masyarakat meningkat. Kemampuan yang meningkat disebabkan penambahan faktor-faktor produksi. Investasi yang terjadi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan (Sukirno dalam Suryanto, 2011).

Berdasarkan kriteria dan kondisi yang terjadi di negara sedang berkembang, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan perekonomian ketika terjadi perubahan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Arsyad (2010) bahwa mekanisme pasar tidak akan mampu menciptakan penyesuaian yang cepat jika terjadi perubahan dan tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat apabila tidak disertai peran pemerintah. Peran pemerintah dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk yang disebabkan oleh mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah dan menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh daerah. Perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antar daerah membawa implikasi campur tangan pemerintah untuk tiap daerah juga berbeda. Perbedaan tingkat pembangunan yang terjadi akan mengakibatkan perbedaan dalam tingkat kesejahteraan antar daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi. Kekuatan yang menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya perubahan dalam faktor produksi yang ada. Faktor produksi yang dimaksud yaitu (Damanhuri dan Findi, 2014):

a. Sumber alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber kekayaan alam atau lahan. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah merupakan hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Permasalahan di negara kurang berkembang yaitu ketersediaan sumber daya alam yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan tepat. Sehingga menyebabkan keterbelakangan dalam pertumbuhan ekonomi.

b. Akumulasi modal

Akumulasi modal merupakan salah satu faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan dengan adanya akumulasi modal maka

dapat memenuhi permintaan penduduk yang terus meningkat. Peningkatan dalam akumulasi modal disisi lain mencerminkan permintaan efektif dan dilain sisi menciptakan efisiensi produktif. Pembentukan modal membawa ke arah pemanfaatan sumber alam, industrialisasi, dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

c. Organisasi

Merupakan faktor pertumbuhan ekonomi yang melibatkan peran swasta atau wirausaha. Dengan adanya wirausaha dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dianggap sebagai organisator dan inovator dalam mengambil resiko dalam ketidakpastian. Kondisi di negara berkembang yang kesulitan wirausaha, kecilnya pasar, kurang modal, kurang sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik, tidak tersedianya bahan baku, dan kurangnya fasilitas publik yang memadai merupakan hambatan yang cukup besar.

d. Kemajuan teknologi

Perubahan teknologi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan perubahan dalam teknologi akan meningkatkan produktifitas buruh, modal, dan faktor produksi lain. Teknologi yang dimaksud melibatkan peran wirausaha sebagai inovator agar dapat diterapkan. Kondisi negara berkembang yang pada umumnya bertumpu pada sektor primer dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktifitas sektor tersebut melalui penggunaan teknologi yang sesuai.

e. Pembagian kerja dan skala produksi

Pembagian kerja berdasarkan spesialisasi dapat meningkatkan produktifitas sehingga dapat meningkatkan skala produksi. Pembagian kerja menghasilkan kemampuan buruh yang optimal sehingga buruh menjadi lebih efisien. Pembagian kerja disebabkan adanya perluasan pasar yang menuntut adanya peningkatan produktifitas dengan kata lain peningkatan dalam skala produksi akan meningkatkan spesialisasi dan pembagian kerja.

Menurut Kuznet dalam Todaro dalam Sasana (2009) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis

terhadap tuntutan keadaan yang ada. Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata. Tetapi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaknya dua syarat yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar.

Kuznet memberikan sebuah hipotesis mengenai hubungan antara pertumbuhan dengan distribusi pendapatan. Menurut Kuznet, pada tahap awal dari suatu proses pembangunan nasional, perbedaan dalam laju pertumbuhan regional yang besar antarprovinsi mengakibatkan kesenjangan dalam distribusi pendapatan antarprovinsi. Dalam jangka panjang, pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan dan dengan asumsi mekanisme pasar bebas dan mobilitas semua faktor produksi antar provinsi tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, perbedaan dalam laju pertumbuhan output antar provinsi cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat pendapatan rata-rata per kapita (dan laju pertumbuhannya) yang semakin tinggi di setiap provinsi, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan ekonomi regional (Tambunan, 1996).

Untuk menciptakan perekonomian yang adil, tugas negara adalah menciptakan pendistribusian pendapatan yang merata sehingga tidak terjadi ketimpangan dan perekonomian akan mantap dan terjadi kelanjutan dalam pertumbuhan. Peran pemerintah sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang tidak disediakan oleh swasta. Pemenuhan fasilitas publik ini akan dapat memaksimalkan pertumbuhan sehingga dapat memaksimalkan distribusi pendapatan yang merata (Tarigan, 2009).

2.1.5 Distribusi Pendapatan

Prestasi pembangunan dapat dinilai dengan tolok ukur pendekatan ekonomi dan pendekatan non ekonomi (Dumairy, 1996). Penilaian terhadap pendekatan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan pendapatan dan nonpendapatan. Aspek pendapatan dapat dilihat pada pendapatan per kapita. Akan tetapi hal ini belum dapat menggambarkan prestasi pembangunan karena hanya merupakan konsep rata-rata sehingga konsep keadilan atau pemerataan terabaikan.

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara terhadap jumlah penduduknya. Kriteria dalam mengukur pemerataan melalui tiga tolok ukur yang lazim digunakan yaitu (Dumairy, 1996):

- a. Kurva Lorenz, menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional dikalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva yang semakin dekat diagonal (semakin lurus) menjelaskan bahwa distribusi pendapatan semakin merata.
- b. Indeks atau Rasio Gini, suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1. Koefisien yang semakin kecil atau mendekati nol maka menunjukkan jika distribusi pendapatan merata dan sebaliknya jika mendekati nilai 1 maka distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata atau timpang. Indeks gini dapat dihitung secara matematik dengan rumus sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{1}^{n} (X_{i+1} - X_i) (Y_i + Y_{i+1})$$

$$0 < G < 1$$

$$G = 1 - \sum_{1}^{n} f_i (Y_i + Y_{i+1})$$

Keterangan:

G : rasio gini

f_i : proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas - i

X_i : proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas - i

Y_i : proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas - i

- c. Kriteria Bank Dunia, didasarkan atas pembagian porsi pendapatan nasional yang dapat dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, serta 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan parah terjadi apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang apabila 40 persen penduduk miskin menikmati antara 12 hingga 17 persen pendapatan nasional. Sedangkan apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati lebih dari 7

persen pendapatan nasional maka dikatakan ketimpangan lunak atau dengan kata lain dikatakan distribusi pendapatan cukup merata.

Ketimpangan pembangunan sering terjadi tidak hanya dalam skala nasional saja akan tetapi juga skala lokal. Ketimpangan menjadi permasalahan serius yang apabila tidak dapat dihilangkan secara hati-hati dapat menimbulkan krisis yang lebih kompleks yang menimbulkan masalah terhadap kependudukan, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan serta dalam konteks makro sangat merugikan proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai (Mopangga, 2011).

Kesenjangan distribusi pendapatan di banyak negara sedang berkembang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang, dan juga kesenjangan dipengaruhi oleh investasi (Todaro dalam Suyana Utama dalam Wahyuni *et.al.* (2014).

Ketimpangan merupakan fenomena umum yang terjadi terutama di negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh perbedaan potensi daerah yang cukup besar, perbedaan kondisi demografis dan ketenagakerjaan, dan perbedaan kondisi sosial budaya antar daerah. Ketimpangan ekonomi yang besar akan menyebabkan kurang efisiennya penggunaan sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan (kemakmuran). Sedangkan apabila dilihat dari segi sosial, ketimpangan akan berdampak pada pembangunan antar daerah itu sendiri dan dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar daerah bahkan dapat mempunyai implikasi politik yang dapat mendorong timbulnya suatu daerah untuk melakukan pemekaran daerah (Sjafrizal, 2014).

2.1.6 Belanja Daerah

Menurut Argi (2011) pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak bergitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Rincian belanja daerah menurut undang-undang ini dibedakan menjadi tiga yaitu rincian belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/ lembaga teknis daerah. Rincian belanja daerah menurut fungsinya antara lain terdiri atas layanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan rincian belanja menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Desentralisasi fiskal di Indonesia saat ini menitikberatkan pada sisi pengeluaran, maka esensi otonomi pengelolaan fiskal di daerah adalah kebebasan untuk membelanjakan dana sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah sehingga pengaruh belanja daerah terhadap perekonomian daerah akan sangat tergantung pada alokasi dan komposisi belanja daerah (Situngkir, *et. al*, 2014).

Perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) diterangkan sebagai berikut:

1. Belanja aparatur daerah adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
2. Belanja pelayanan publik adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Adapun perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

2. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

2.1.7 Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan

Menurut Arsyad (1999), masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Berdasarkan pendapat Waluyo dalam Aulia (2014) otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal pada umumnya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah karena pemberian wewenang yang lebih luas diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sehingga memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan perkapita.

Menurut Oates dalam Sasana (2009) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganeekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

Menurut Setyawati dan Hamzah (2007) peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

2.1.8 Desentralisasi Fiskal dengan Kesenjangan Daerah

Desentralisasi merupakan tatanan pemerintahan yang baru yang diharapkan dapat membawa perubahan khususnya dalam kegiatan perekonomian. Kewenangan yang terdesentralisasikan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu pemerataan dalam distribusi pendapatan. Aspek desentralisasi fiskal menjadi bagian yang fundamental dalam pelaksanaan desentralisasi itu sendiri. Kewenangan dalam penentuan sumber penerimaan dan pengalokasian pengeluaran diharapkan mampu meningkatkan partisipasi aktif daerah secara keseluruhan, baik aparatur pemerintahan maupun masyarakat dengan mengoptimalkan peranan sektor-sektor perekonomian yang menjadi kekuatan serta daya dorong bagi perkembangan sektor lain.

Kewenangan dalam penentuan alokasi pengeluaran pemerintah harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dengan mengedepankan pemenuhan infrastruktur serta sarana publik untuk mendukung pemberian pelayanan yang prima. Peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya fasilitas pendidikan dapat mengurangi permasalahan keterbatasan kualitas sumber daya yang sering menjadi masalah khususnya bagi negara sedang berkembang sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi dalam rangka peningkatan modal serta kebutuhan akan faktor produksi tenaga kerja yang berkualitas dapat terpenuhi. Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila ditunjang dari segi pengetahuan masyarakat yang tinggi, adanya sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar guna tercapainya kemajuan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan tidak hanya di dukung faktor fisik yang

ada akan tetapi juga faktor non fisik seperti kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya.

Sejalan dengan pendapat Mardiasmo dalam Nurman (2013) yang menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan, antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, tata kelola dan transparansi serta akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran dan waktu, mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan Prud'homme dalam Nurman (2013) bahwa titik pandang dari desentralisasi fiskal adalah efisiensi. Menurut McKinnon, Qian, dan Wengias dalam Nurman (2013) mengungkapkan bahwa disparitas regional mungkin berhubungan dengan efisiensi dari pelayanan publik dan oleh karenanya desentralisasi fiskal tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, tetapi juga mengurangi disparitas regional yang sebelumnya terjadi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian empiris dari penelitian terdahulu sebagai pengarah dalam penelitian ini yaitu:

Joko Waluyo (2007) Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia. Menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah. Dengan alat analisis *Two Stage Least Square* (TSLS) dan Indeks Williamson. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam.

Amin Pujiati (2008) Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Tenaga Kerja. Dengan alat analisis *Generalized Least Square* (GLS). Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa PAD, DBH, DAU, dan Tenaga kerja memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Semarang.

Dwi Suryanto (2011) Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008. Menggunakan variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan. Dengan alat analisis *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten.

Rifa Surya (2012) *Fiscal Decentralization, Growth and Disparity Among Region in Indonesia*. Menggunakan variabel indikator otonomi, indikator produksi, dan pengeluaran perkapita. Dengan alat analisis *Pool Ordinary Least Square* dengan *Fixed Effect* dan *Random effect*. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa kenaikan indikator otonomi yang direpresentasikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak terhadap penurunan pertumbuhan PDRB per kapita serta kenaikan tingkat disparitas antar daerah setelah periode desentralisasi di Indonesia.

Muhammad Andry Nurman (2013) Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Indonesia Tahun 2001-2008. Menggunakan variabel Desentralisasi Fiskal dengan proxy belanja langsung (desentralisasi pengeluaran), serta PAD, DAU, dan Dana Bagi Hasil (desentralisasi penerimaan). Dengan alat analisis *Least Square Dummy Variables* (LSDV) atau *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Newey West Method*. Hasil studi menunjukkan variabel belanja langsung mampu mengurangi disparitas pendapatan regional.

Nely Aulia (2014) Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Menggunakan variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), elastisitas PAD, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan. Dengan alat analisis deskriptif kualitatif dan analisis korelasi kanonikal. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa terdapat

hubungan yang signifikan antara variabel independen desentralisasi fiskal melalui Derajat desentralisasi Fiskal (DDF), elastisitas PAD, dan kapasitas fiskal dengan variabel dependen pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan secara bersama-sama. Pada variabel independen hanya variabel DDF yang mempunyai hubungan paling erat dengan variabel dependen. Sedangkan pada variabel dependen, variabel kesenjangan pendapatan memiliki hubungan paling erat dengan variabel independen.

I Gusti Ayu Putri Wahyuni, *et.al* (2014) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Menggunakan variabel Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Pendapatan. Dengan alat analisis menggunakan Analisis Jalur (*Path Analysis*.) Hasil studi menunjukkan pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan.

Penelitian terdahulu tersebut di jelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Hasil
1.	Joko Waluyo (2007) Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia	Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah	Dengan menggunakan alat analisis <i>Two Stage Least Square</i> (TSLS) dan Indeks Williamson, desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam.

2.	Amin Pujiati (2008) Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Tenaga Kerja	Dengan menggunakan alat <i>Generalized Least Square</i> (GLS) diperoleh hasil PAD, DBH, DAU, dan Tenaga kerja memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Semarang
3.	Dwi Suryanto (2011) Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008.	Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi	Menggunakan alat analisis <i>Least Square Dummy Variable</i> (LSDV) menunjukkan hasil variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten.
4.	Rifa Surya (2012) <i>Fiscal Decentralization, Growth and Disparity Among Region in Indonesia</i>	Indikator otonomi, indikator produksi, dan pengeluaran perkapita	Dengan menggunakan alat analisis <i>Pool Ordinary Least Square</i> dengan <i>Fixed Effect</i> dan <i>Random effect</i> diperoleh hasil Kenaikan indikator otonomi yang direpresentasikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak terhadap penurunan pertumbuhan PDRB per kapita serta kenaikan tingkat disparitas antar daerah setelah periode desentralisasi di Indonesia
5.	Muhammad A. Nurman (2013) Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Indonesia Tahun 2001-2008	Desentralisasi Fiskal dengan proxy belanja langsung (desentralisasi pengeluaran), serta PAD, DAU, dan Dana Bagi Hasil (desentralisasi penerimaan)	Dengan alat analisis <i>Least Square Dummy Variables</i> (LSDV) atau <i>Fixed Effect Model (FEM)</i> dan <i>Newey West Method</i> . Hasil studi menunjukkan variabel belanja langsung mampu mengurangi disparitas pendapatan regional dan PAD tidak berpengaruh sinifikan dalam menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional

6.	Nely Aulia (2014) Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), elastisitas PAD, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Kesenjangan Pendapatan	Menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif dan analisis korelasi kanonikal terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen desentralisasi fiskal melalui Derajat desentralisasi Fiskal (DDF), elastisitas PAD, dan kapasitas fiskal dengan variabel dependen pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan secara bersama-sama.
7.	I Gusti Ayu Putri Wahyuni, <i>et.al</i> (2014) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Pendapatan	Menggunakan alat analisis jalur (<i>path analysis</i>) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan dan juga pengaruh yang positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan pendapatan

2.3 Kerangka Konseptual

Pemerintahan era desentralisasi dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk meningkatkan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan adanya pelimpahan wewenang pada pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi sumber daya untuk peningkatan pembangunan berdasarkan kebutuhan pengembangan daerah yang bersangkutan. Momentum desentralisasi ini tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Sehingga Pemerintah Pusat masih tetap memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan arah dan strategi pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Kondisi ini mengharuskan dukungan pendanaan dari pusat khususnya pada program pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Mengenai transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat, selain untuk mendukung program pemerintah pusat di daerah juga untuk menanggulangi kesenjangan yang mungkin akan terjadi selama pelaksanaan desentralisasi berlangsung. Oleh karena itu,

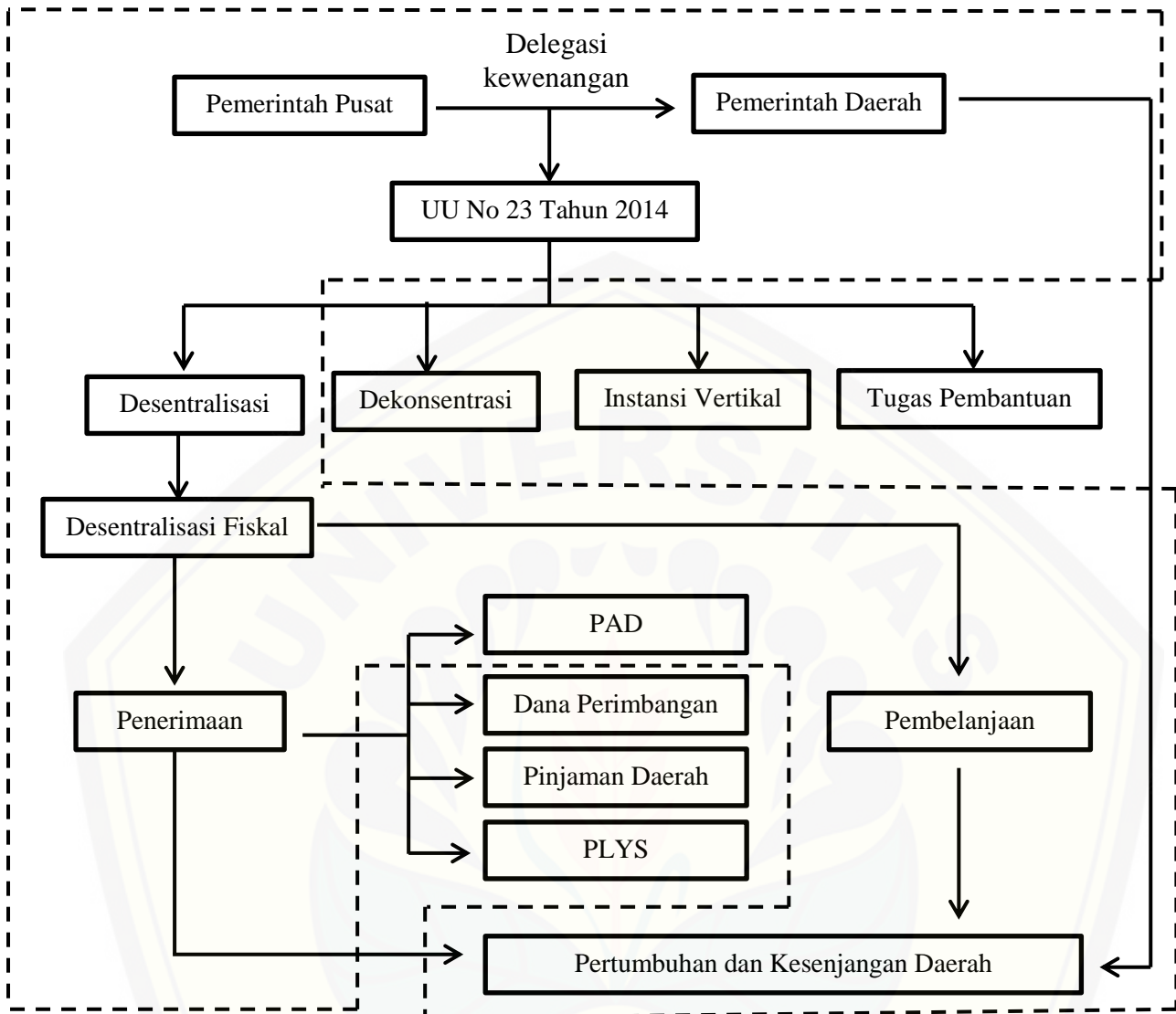
desentralisasi fiskal ini merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan konsep desentralisasi fiskal itu sendiri merupakan pengertian dari pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disertai dengan wewenang pendanaan. Wewenang yang dimaksud dalam desentralisasi fiskal berupa pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan dan pembelanjaan. Faktor yang penting adalah bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan mereka serta menentukan alokasi pengeluarannya sendiri. Peningkatan pendapatan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengintensifkan perolehan pajak. Hal ini perlu untuk dilakukan mengingat potensi pendapatan yang utama bagi daerah diperoleh dari pajak. Namun, bukan berarti peningkatan pajak ini membuat agresivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan saja tetapi juga harus disertai dengan peningkatan pelayanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Keynes memandang peranan pemerintah sangat penting dalam perekonomian karena pemerintah merupakan pengatur jalannya perekonomian. Mengenai peranan pemerintah dalam perekonomian, tugas pemerintah adalah menciptakan keadilan dalam perekonomian dengan pendistribusian pendapatan yang merata. Selain itu juga penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang tidak disediakan oleh swasta. Pemenuhan fasilitas publik ini dapat memaksimalkan pertumbuhan dan meratakan distribusi pendapatan.

Dalam pemenuhan fasilitas publik, pemerintah daerah melakukan pengeluaran yang berasal dari kas daerah untuk membiayai pengeluaran tersebut. Pengeluaran ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian sebagaimana pendapat Sasana (2008) bahwa pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu untuk menjalankan sektor yang tidak dilakukan oleh sektor swasta. Sementara itu, Keynes menyatakan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat mendorong pengeluaran agregat saat kondisi daya beli masyarakat sedang menurun.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan Gambar 2.3:



Gambar 2.3 Bagan Kerangka Konseptual

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PLYS : Pendapatan Lain- lain Yang Sah

————> : Hubungan Langsung

- - - - : Ruang Lingkup Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan praduga sementara mengenai hubungan antar variabel dalam penelitian. Berdasarkan penelitian Waluyo (2007) diperoleh hasil jika

desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan terutama di daerah pusat bisnis yang memiliki sumber daya alam yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Pujiati (2008) yang mendapatkan hasil jika desentralisasi fiskal memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan di Karesidenan Semarang. Sedangkan penelitian Aulia (2014) diperoleh hasil jika desentralisasi fiskal yang diwakili oleh Derajat Desentralisasi Fiskal (Rasio PAD terhadap Total Pendapatan) sebagai variabel independen paling berpengaruh terhadap pertumbuhan. Terhadap variabel dependen kesenjangan, berdasarkan penelitian Surya (2012) menghasilkan kesimpulan jika Indikator otonomi yang direpresentasikan oleh PAD menaikkan tingkat disparitas antar daerah setelah periode desentralisasi di Indonesia. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Aulia (2014) diperoleh kesimpulan jika variabel dependen kesenjangan pendapatan sangat erat hubungannya dengan variabel independen. Sedangkan terhadap hubungan variabel kontrol dengan variabel dependen, penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2011) menunjukkan hasil pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Nurman (2013) menunjukkan hasil belanja langsung yang merupakan proksi dari desentralisasi pengeluaran memiliki dampak positif mengurangi kesenjangan pendapatan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, *et.al* (2014) menunjukkan hasil pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Berdasarkan fakta empiris penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Desentralisasi fiskal di duga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan di Jawa Timur.
2. Desentralisasi fiskal diduga berpengaruh negatif terhadap kesenjangan daerah
3. Variabel kontrol diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan berpengaruh negatif terhadap kesenjangan daerah.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel terikat dengan variabel bebas serta pengaruh antara dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesa.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desentralisasi fiskal yang diproksi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel kontrol yang diproksi dari data belanja daerah sebagai variabel bebas (*Independent variable*) sedangkan pertumbuhan dan kesenjangan sebagai variabel terikat (*dependent variable*) di Provinsi Jawa Timur meliputi 38 Kabupaten/Kota selama kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2010-2014.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk panel yaitu gabungan antara data deret waktu dengan deret lintang yang meliputi 38 kabupaten/kota dan rentang waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2010-2014 yang diperoleh dari studi kepustakaan serta publikasi Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dirjen Perimbangan Keuangan serta lembaga atau instansi-instansi lain yang terkait dan mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014
2. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014
3. Belanja Daerah/Total Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014
4. PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

3.1.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau metode kuadrat terkecil. Untuk mengetahui hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan dan kesenjangan daerah di Provinsi Jawa Timur menggunakan data panel dan diolah menggunakan software Eviews. Data panel yang digunakan merupakan kombinasi antara deret waktu (*time series*) yakni rentang 5 tahun mulai 2010 hingga 2014 serta deret lintang (*cross section*) yakni 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur sehingga total sebanyak 190 observasi. Data panel dipilih dalam penelitian ini karena dinilai lebih spesifik dan memiliki jangkauan yang luas secara spasial serta analisis empirik yang dilakukan tidak memungkinkan jika hanya menggunakan salah satu dari data *time series* ataupun data *cross section*.

Menurut Baltagi dalam Gujarati (2012), keuntungan data panel dibanding data deret waktu (*time series*) maupun data deret lintang (*cross section*) alasannya sebagai berikut:

1. Bila data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, negara, daerah dan lain-lain pada waktu tertentu, maka data tersebut adalah heterogen. Teknik estimasi data panel yang heterogen secara eksplisit dapat dipertimbangkan dalam perhitungan.
2. Kombinasi data *time series* dan *cross section* akan memberikan informasi yang lebih lengkap, lebih beragam, kurang berkorelasi antar variabel, derajat bebas lebih besar dan lebih efisien.
3. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan studi berulang-ulang dari *cross section*.
4. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur dampak lebih baik yang tidak bisa diamati dalam data *cross section* murni atau *time series* murni. Misalnya dampak upah minimum terhadap tenaga kerja dan pendapatan akan lebih baik jika memasukkan frekuensi kenaikan upah minimum pemerintah pusat dan/atau upah minimum negara
5. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks, misalnya fenomena skala ekonomis dan perubahan teknologi.

6. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atau perusahaan karena unit data lebih banyak.

Dalam penelitian ini, model pertumbuhan merupakan fungsi dari Desentralisasi Fiskal dan Variabel Kontrol, maka persamaan fungsinya sebagai berikut:

$$G_{it} = f(FD_{it}, CV_{it},) \dots\dots\dots (3.1)$$

Dari persamaan fungsi (3.1) tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam model ekonometrika linear sebagai berikut:

$$G_{it} = \beta_0 + \beta_1 FD_{it} + \beta_2 CV_{it} + e_{it} \dots\dots\dots (3.2)$$

Model kesenjangan dalam penelitian ini merupakan fungsi dari desentralisasi fiskal dan variabel kontrol sehingga persamaan fungsinya adalah sebagai berikut:

$$D_{it} = f(FD_{it}, CV_{it},) \dots\dots\dots (3.3)$$

Dari persamaan fungsi (3.3) tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam model ekonometrika semilog (lin-log) sebagai berikut:

$$D_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log FD_{it} + \beta_2 \log CV_{it} + e_{it} \dots\dots\dots (3.4)$$

dimana:

G = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

D = Kesenjangan Daerah Provinsi Jawa Timur

FD = *Fiscal Decentralization* Provinsi Jawa Timur

CV = *Control Variabel*

logFD = log *Fiscal Decentralization* Provinsi Jawa Timur

logCV = log *Control Variabel*

i = *cross section*

t = *time series*

- β_0 = konstanta
e = *error term*

Dalam analisis data panel dapat menggunakan dua metode yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Sebelum mengestimasi model penelitian, dilakukan uji pemilihan model menggunakan Uji Hausman untuk menentukan apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi model.

a. *Fixed Effect Model* (FEM)

Menurut Gujarati dalam Suryanto (2011) menjelaskan bahwa estimasi model regresi panel data dengan pendekatan *fixed effect* tergantung pada estimasi yang digunakan pada intersep, koefisien slope, dan *error term* dimana ada beberapa asumsi yaitu:

- 1) Asumsi bahwa intersep dan koefisien *slope* (kemiringan) adalah konstan antar waktu (*time*) dan ruang (*space*) dan *error term* mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu (ruang).
- 2) Koefisien slope konstan tapi intersep bervariasi antar individu (wilayah)
- 3) Koefisien slope konstan tapi intersep bervariasi antar waktu
- 4) Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar waktu dan individu (wilayah)
- 5) Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu (wilayah)
- 6) Intersep konstan sebagaimana koefisien slope bervariasi antar waktu

Model *fixed effect* disebut juga dengan model *Least Square Dummy Variable* (LSDV) memperkenankan heterogenitas antarsubjek dengan memberi setiap entitas nilai intersep tersendiri. Disebut *fixed effect* karena meskipun intersep berbeda-beda untuk tiap-tiap subjek, tetapi tiap intersep tiap entiti tidak berubah seiring waktu yang mana hal ini disebut invarian waktu. Model ini mengasumsikan bahwa koefisien (slope) dari variabel independen tidak berbeda untuk setiap individual atau antarwaktu (Gujarati dan Porter, 2012).

Model *fixed effect* merupakan model dimana intersep dari model bervariasi berdasarkan individu dalam sampel. Persamaan dalam model *fixed effect* yaitu:

$$Y_{it} = \alpha_i + x_{it}\beta + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.5)$$

Dimana i merupakan individu $1,2,\dots,N$ dan t merupakan periode $1,2,\dots,T$. Analisis *fixed effect* model bisa dilakukan dengan dua cara yaitu *least square dummy variable* (LSDV) dan *within transformation*. Dengan menggunakan variabel pembeda *dummy*, persamaan regresi diatas dapat ditulis kembali menjadi (Effendi, Nury dan Maman Setiawan, 2014):

$$Y_{it} = \alpha + \sum_{j=2}^N \alpha_j d_{ij} + x_{it}\beta + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.6)$$

Dimana $d_{ij} = 1$ jika $i=j$, sedangkan $i \neq j$ bernilai 0. Dalam model, $j=0$ ditangkap oleh α_0 . Seluruh parameter bisa secara langsung diestimasi dengan menggunakan *least square*, sehingga model ini disebut sebagai *least-square dummy variable*.

b. *Random Effect Model* (REM)

Model *random effect* mengasumsikan bahwa efek individu merupakan faktor yang acak (random). Faktor tersebut diambil dari faktor kesalahan (*error term*) yang acak, yaitu (Effendi, Nury dan Maman Setiawan, 2014):

$$Y_{it} = \beta_0 + x_{it}\beta + \alpha_i + v_{it} \dots\dots\dots (3.7)$$

Dimana $\alpha_i + v_{it}$ merupakan faktor kesalahan yang acak. Faktor kesalahan tersebut terdiri atas komponen spesifik dari individu yang konstan sepanjang waktu dan komponen faktor kesalahan yang diasumsikan tidak memiliki masalah autokorelasi.

Menurut Gujarati dan Porter (2012) model ini mengasumsikan jika intersep (bersama) mewakili nilai rata-rata dari semua intersep (*cross section*) dan

komponen error ε_i mewakili deviasi (acak) dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tersebut.

Terdapat keunggulan masing-masing dari kedua metode tersebut untuk mengetahui pemilihan model yang tepat digunakan dalam analisis. Keunggulan tersebut antara lain (Gujarati dan Porter, 2012):

1. Jika T (jumlah data time series) adalah besar dan N (jumlah data cross section) adalah kecil, kemungkinan akan ada sedikit perbedaan dalam nilai-nilai parameter yang diestimasi FEM dan ECM. Oleh karena itu, pemilihannya berdasarkan kenyamanan perhitungan saja. Dalam hal ini, FEM lebih disukai.
2. Ketika N besar dan T kecil (yaitu sebuah panel pendek), hasil estimasi yang diperoleh dari kedua metode bisa berbeda secara signifikan. Ingat kembali pada ECM $\beta_{1i} = \beta_1 + \varepsilon_i$, dimana ε_i adalah komponen cross section acak, dimana di dalam FEM kita menganggap β_{1i} sebagai nilai tetap dan tidak acak. Dalam kasus terakhir, inferensi statistik tergantung pada unit cross section yang diobservasi dalam sampel. Hal ini pantas jika kita sangat percaya bahwa unit individu atau cross section dari sampel kita bukanlah hasil pengambilan acak dari sampel yang lebih besar lagi. Maka dalam kasus ini, FEM yang pantas untuk digunakan. Jika unit cross section dianggap diambil secara acak, namun ECM yang pantas dipakai, maka inferensi statistik adalah tidak bersyarat.
3. Jika komponen error individual ε_i dan satu atau lebih variabel independen saling berkorelasi, maka estimator ECM adalah bias, sedangkan yang diambil dari FEM tidak bias.
4. Jika N besar dan T kecil, dan jika asumsi yang mendasari ECM terpenuhi, estimator ECM akan lebih kuat daripada FEM.
5. Tidak seperti FEM, ECM bisa mengestimasi koefisien dari variabel yang tidak dipengaruhi waktu seperti gender dan etnisitas. FEM memang mengontrol variabel yang dipengaruhi waktu ini, namun ini tidak dapat mengestimasi secara langsung, seperti yang telah dijelaskan pada LSDV atau model estimator dalam kelompok. Sebaliknya, FEM mengontrol semua

variabel yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Sedangkan ECM hanya dapat mengestimasi variabel tersebut secara eksplisit disebutkan dalam model.

3.2 Uji Pemilihan Model

3.2.1 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan pemilihan model apakah harus menggunakan metode *Fixed Effect Model (FEM)* atau metode *Random Effect Model (REM)* yang paling tepat digunakan dalam analisis. Uji Hausman akan memberikan penilaian dengan menggunakan *Chi Square Statistics*. Penolakan terhadap statistik Hausman tersebut berarti penolakan terhadap *Random Effect Model* dan begitu juga sebaliknya.

Prosedur Uji Hausman adalah sebagai berikut (Aulia dalam Ajija, *et.al*, 2011):

1. Buat Hipotesis dari Uji Hausman : $H_0 = \text{random effect}$ dan $H_1 = \text{fixed effect}$
2. Menentukan kriteria uji: apabila *Chi-square* hitung $>$ *Chi-square* tabel dan probabilitas hitung $<$ $\alpha = 5\%$, maka hipotesis H_0 ditolak, sehingga metode *Fixed Effect Model* lebih tepat digunakan. Dan apabila *Chi-square* hitung $<$ *Chi-square* tabel dan probabilitas hitung $>$ $\alpha = 5\%$, maka hipotesis H_0 diterima, sehingga metode *Random Effect Model* lebih tepat untuk digunakan.

Dari hasil uji yang dilakukan mendapatkan hasil sebagai berikut:

H_0 : menggunakan estimasi *Random Effect Model*

H_1 : menggunakan estimasi *Fixed Effect Model*

3.3 Uji Statistik

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat menggunakan uji statistik sebagai berikut:

3.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial (Uji t) digunakan untuk menguji secara individual seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen, dimana nilai Uji t dapat diperoleh melalui rumus berikut:

$$t = \frac{\beta_1 - \beta_1^*}{S_e(\beta_1)}$$

Dimana:

β_1 = Parameter yang diestimasi

β_1^* = nilai hipotesis dari β_1 ($H_0: \beta_1 = \beta_1^*$)

$S_e(\beta_1)$ = simpangan baku dari variabel independen ke-1

Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat hipotesis berikut:

$H_0: \beta_1 = 0$, berarti tidak ada pengaruh nyata antara desentralisasi fiskal dengan variabel kontrol terhadap pertumbuhan dan kesenjangan daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

$H_0: \beta_1 \neq 0$, berarti ada pengaruh nyata antara desentralisasi fiskal dengan variabel kontrol terhadap pertumbuhan dan kesenjangan daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014.

Pada tingkat signifikansi 0,05 (5%), pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut (Ajija, *et.al*, 2011):

- a. H_0 diterima H_1 ditolak, apabila nilai t hitung < nilai t-tabel. Hal ini berarti variabel independen tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. H_0 ditolak H_1 diterima, apabila nilai t hitung > nilai t-tabel. Hal ini berarti variabel independen signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk membuktikan pengaruh secara simultan seluruh variabel independen yaitu desentralisasi fiskal dan variabel kontrol terhadap pertumbuhan dan kesenjangan daerah di Provinsi Jawa Timur. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

- a. $H_0: \beta_1; \beta_2 = 0$

Jumlah desentralisasi fiskal dan variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kesenjangan daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014.

b. $H_1: \beta_1; \beta_2 \neq 0$

Jumlah desentralisasi fiskal dan variabel kontrol berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kesenjangan daerah di Provinsi Jawa Timur 2010-2014.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, maka pengujian hipotesis (Ajija, *et.al*, 2011):

1. Bila F probabilitas $\leq \alpha$, berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Bila F probabilitas $\geq \alpha$, berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Selain pengujian hipotesis dengan menggunakan perbandingan probabilitas nilai Uji F dengan tingkat signifikansi, pengujian hipotesis Uji F juga dapat diperoleh dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel (Ajija, *et.al*, 2011). Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus:

$$F_{hit} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel independen

n = jumlah observasi

3.3.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji Koefisien Determinasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel independen dapat menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\Sigma(\hat{Y}^1 - \hat{Y})^2}{\Sigma(Y^1 - \hat{Y})^2}$$

Nilai R^2 atau (R^2 adjusted) berkisar antara 0 sampai 1 (Ajija, *et.al*, 2011). Nilai R^2 yang sempurna adalah satu (1), yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang

dimasukkan ke dalam model. Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- a. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang sangat lemah.
- b. Nilai R^2 mendekati satu, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel dependen sangat tinggi.

3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi memenuhi asumsi dasar linier klasik atau tidak. Hal ini dikarenakan berhubungan erat dengan estimasi OLS (*Ordinary Least Square*) dari kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

3.4.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel bebas lainnya. dengan kata lain adanya gejala multikolinearitas menunjukkan terdapatnya hubungan sempurna antara semua atau beberapa variabel penjelas (variabel bebas) (Wardhono, 2004). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ariani, 2010).

Kondisi terjadinya multikolinearitas ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2012):

- a. Tanda paling jelas adalah ketika R^2 sangat tinggi, tetapi tidak ada koefisien regresi yang secara statistik signifikan berdasarkan uji t konvensional.
- b. Pada model yang hanya melibatkan dua variabel penjelas, ide yang cukup baik untuk mendeteksi kolinearitas adalah memeriksa koefisien korelasi *zero order* atau sederhana diantara kedua variabel. Jika koefisien ini tinggi, multikolinearitas umum terjadi.

- c. Bagaimanapun, koefisien korelasi *zero order* dapat menyesatkan pada model yang melibatkan lebih dari dua variabel X karena kemungkinan koefisien korelasi *zero order* yang rendah, tetapi multikolinearitasnya tinggi.
- d. Jika R^2 tinggi, tetapi korelasi parsial rendah, mungkin terdapat multikolinearitas. Disini, satu atau lebih variabel mungkin tidak berguna. Namun demikian, jika R^2 tinggi dan koefisien korelasi parsial juga tinggi, multikolinearitas mungkin belum dapat dideteksi.
- e. Oleh karena itu, seseorang mungkin melakukan regresi untuk setiap variabel X_i terhadap variabel X sisanya pada model dan mencari tahu koefisien determinasinya, R_i^2 . Nilai R_i^2 yang tinggi menunjukkan bahwa X_i berkorelasi kuat dengan semua variabel X lainnya.

Besaran korelasi parsial antara variabel independen yang dapat dikatakan memiliki multikolinearitas adalah jika koefisien korelasi parsial antar variabel independen memiliki korelasi lebih dari 0,85. Apabila dijumpai nilai ini dalam Uji Multikolinearitas maka suatu model patut dicurigai terdapat hubungan antar variabel independennya. Suatu keadaan multikolinearitas dalam model tidak harus menjadi masalah yang serius karena meskipun model memiliki masalah multikolinearitas, model akan tetap dapat terus digunakan hanya saja standar error yang akan bermasalah. Dan model dengan kondisi ini masih akan tetap bersifat BLUE (Widarjono, 2013).

3.4.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel pengganggu, terutama berkaitan dengan observasi. Ada kemungkinan dalam suatu model, variabel bebas yang digunakan kurang tepat. Pengujian ada tidaknya autokorelasi biasanya dilakukan dengan menggunakan *Durbin Watson* yang dinyatakan dalam persamaan berikut:

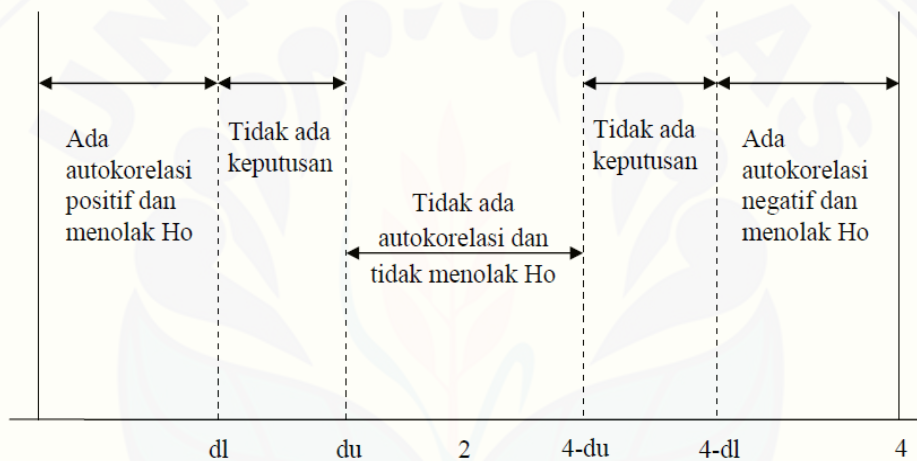
$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=2}^n (e_t)^2}$$

Tabel 3.1 Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi Positif	Tidak ada keputusan	$d_l < d < d_u$
Ada autokorelasi negative	Tolak	$4-d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-d_u < d < 4-d_l$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$d_u < d < 4-d_u$

Sumber: Argi (2011)

Penjelasan atas kriteria pengujian tersebut didasarkan pada Gambar 3.1 yang merupakan aturan perbandingan dengan tabel durbin watson untuk menentukan kriteria pengambilan keputusan:



Gambar 3.1 Aturan Tabel Durbin Watson (Sumber: Argi, 2011)

Uji D-W merupakan salah satu uji yang banyak dipakai untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Nilai yang menunjukkan terdapat autokorelasi atau tidak dalam model dijelaskan dengan nilai d (yang menggambarkan koefisien DW). Nilai d akan berada di kisaran 0 hingga 4 (Winarno, 2009).

Otokorelasi merupakan korelasi antara anggota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu (seperti data *cross section*), atau korelasi pada dirinya sendiri. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya autokorelasi adalah kelembaman (inertia), terjadi bias dalam spesifikasi, terjadi bias dalam spesifikasi bentuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat, fenomena sarang laba-laba (*cobweb phenomena*), beda kala (*time lags*), adanya manipulasi data (*manipulation of data*) (Supranto, 2004).

3.4.3 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas, yaitu $E(X_i, \epsilon_i) \neq 0$, sehingga $E(\epsilon_i)^2 \neq \sigma^2$. Ini merupakan pelanggaran salah satu asumsi tentang model regresi linear berdasarkan metode kuadrat terkecil. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model dilakukan melalui beberapa metode yaitu berdasarkan sifat persoalannya, Metode grafik, Uji Park, Uji Glejser, Uji Korelasi Rank dari Sparman (Supranto, 2004).

Uji heterokedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model terdapat ketidaksamaan varian kondisional dari variabel dependen yang dipengaruhi variabel independen. Pengujian untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian Park (*Park Test*). Menurut Winarno (2009), hasil Uji Park dapat dilihat pada uji t maupun probabilitasnya. Apabila probabilitas uji tersebut menunjukkan nilai signifikan, maka terdapat heterokedastisitas.

Dalam penelitian ini nilai signifikansi sebesar 5%, sehingga kriteria untuk mengetahui variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan heterokedastisitas apabila hasil uji park menunjukkan probabilitas kurang dari tingkat signifikansi 5%. Dan sebaliknya, dikatakan homokedastisitas apabila nilai probabilitasnya melebihi tingkat signifikansi 5%.

3.4.4 Uji Normalitas

Merupakan uji terhadap kebenaran atas keabsahan dilakukan uji t dan uji F. Variabel pengganggu diasumsikan memiliki distribusi normal, sehingga jika ada kemungkinan tidak normal, maka tidak dapat dilakukan uji t maupun uji F. Menurut Widarjono (2013), uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang biasa digunakan yaitu melalui histogram dan uji Jarque-Bera (JB).

Pengujian hipotesis normalitas dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut (Ajija, *et.al*, 2011):

H_0 = error term terdistribusi normal

H_1 = error term tidak terdistribusi normal

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dibanding dengan nilai tingkat signifikansi yang dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 artinya error term tidak terdistribusi dengan normal. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari nilai tingkat signifikansi 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya error term terdistribusi normal.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan secara rinci mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Desentralisasi Fiskal

Variabel Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini direpresentasikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD direpresentasikan sebagai variabel desentralisasi fiskal dikarenakan menggambarkan otoritas lokal pemerintah daerah sebab PAD menunjukkan nilai otonomi daerah secara langsung dalam kemandirian fiskal. Hal ini sependapat dengan Sumarsono (2009) bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga sesuai dengan pendapat Radianto dalam Thesaurianto (2007) bahwa salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan adalah desentralisasi fiskal daerah (otonomi fiskal). Pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Karena itu pemerintah daerah secara finansial harus bersifat

independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD.

2. Variabel Kontrol

Variabel kontrol dibuat dalam rangka untuk melihat kemungkinan adanya variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti (Tasrin dan Wulandari, 2012) yang dalam penelitian ini dinilai akan mempengaruhi pertumbuhan dan kesenjangan daerah. Variabel kontrol dalam penelitian ini diukur melalui aspek pengeluaran daerah berupa belanja daerah. Belanja daerah adalah realisasi belanja pemerintah daerah yang telah dianggarkan dalam APBD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Data yang digunakan berupa data belanja daerah yang merupakan jumlah dari belanja langsung dan belanja tak langsung Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. Belanja daerah diproksi sebagai variabel kontrol karena belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan sebagai alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian. Menurut Wahyuni *et.al.* (2014) pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dari pembangunan karena dianggap sebagai alat intervensi yang paling efektif terhadap perekonomian. Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditentukan oleh besarnya pengeluaran.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi yang dimaksud disini adalah pertumbuhan ekonomi yang dilihat berdasarkan PDRB tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2010-2014 dengan menggunakan tahun dasar konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi menggunakan data PDRB karena Produk Domestik Regional Bruto dapat menunjukkan nilai produktivitas perekonomian suatu daerah pada tahun yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pengertian PDRB menurut BPS (2015) bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Lebih jauh dijelaskan jika PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi suatu wilayah. Perekonomian dikatakan tumbuh dan berkembang apabila barang dan jasa yang diproduksi pada periode ini jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.

4. Kesenjangan Daerah

Kesenjangan daerah dalam penelitian ini adalah kesenjangan daerah yang terjadi akibat perbedaan dalam perekonomian daerah yang diukur berdasarkan koefisien gini yang mencerminkan ketimpangan pendapatan. Data indeks gini yang digunakan adalah data indeks gini Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dalam analisis model pertumbuhan dan kesenjangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Desentralisasi Fiskal dan Variabel Kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan di Jawa Timur serta ada kecenderungan desentralisasi fiskal dan variabel kontrol meningkatkan pertumbuhan di daerah pusat bisnis atau industri
2. Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kesenjangan dan Variabel Kontrol memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kesenjangan serta ada kecenderungan variabel kontrol meningkatkan kesenjangan di wilayah perkotaan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Jawa Timur yaitu:

1. Daerah yang menjadi pusat industri dapat diberikan kewenangan berupa ruang fiskal yang lebih besar yang di inisiasikan oleh daerah sendiri seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Peningkatan belanja daerah di Kabupaten semestinya lebih diutamakan dibanding Kota, mengingat belanja daerah cenderung meningkatkan kesenjangan di wilayah Kota.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pembahasan lebih mendalam dengan menggunakan analisis yang lebih komprehensif dan mampu menjawab permasalahan desentralisasi lebih luas. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah lingkup spasial hanya di Jawa Timur yang dirasa kurang mencukupi untuk menggambarkan penerapan desentralisasi secara keseluruhan di Indonesia serta variabel dan batasan penelitian yang kurang meluas sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan memperhatikan kondisi obyek penelitian serta didukung dengan variabel yang lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ajija, S.R., *et.al.* 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- _____. 2010. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2010-2014*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Damanhuri, D.S dan M. Findi. 2014. *Masalah dan Kebijakan : Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Dirjen Perimbangan Keuangan. 2010-2014. *APBD Provinsi Jawa Timur*.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Effendi, N. dan Maman Setiawan. 2014. *Ekonometrika: Pendekatan Teori dan Terapan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D.N. dan Dawn C. Porter. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Universitas Brawijaya.
- Nachrowi, N.D., dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Rahayu, A.S. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Sukirno, S. 2013. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supranto, J. 2004. *Ekonometri*. Buku Kedua. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tambunan, T.T.H. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, R. 2009. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Widarjono, A. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Winarno, W.W. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Jurnal:

- Akai, N., Sakata, M. 2002. *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data for The United States*. Journal of Urban Economics, Vol. 52 (93-108). Academic Press.
- Aulia, N. 2014. *Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012*. Economics Development Analysis Journal Vol. 3 No. 2 – Universitas Negeri Semarang.
- Mopangga, H. 2011. *Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo*. Jurnal Trikonomika Vol 10 NO. 1 (40-51). Gorontalo- FE dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Nurman, M.A. 2013. *Pengaruh desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Indonesia Tahun 2001-2008*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 9 No. 1 (1-20).
- Pujiati, A. 2008. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Hal. 61-70. Universitas Negeri Semarang.
- Sasana, H. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Vol 1 No. 1- FE Universitas Negeri Semarang.

- _____.2009. *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 1 (103-124) – FE Universitas Diponegoro Semarang.
- Setiyawati, A. dan Ardi Hamzah. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 4 No. 2 (211-228) – FE Universitas Trunojoyo.
- Situngkir, F., et.al. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi Vol. 17 No. 3. Medan - Universitas Sumatera Utara.
- Sodik, J. 2007. *Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No. 1. Yogyakarta - UPN Veteran.
- Sumarsono, H. 2009. *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999-2004)*. Penelitian - Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan (JESP) Vol. 1 No. 1.
- Surtikanti. 2013. *Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Majalah Ilmiah UNIKOM Vol. 11 No. 1 – Universitas Komputer Indonesia.
- Surya, R. 2012. *Fiscal Decentralization, Growth and Disparity Among Region In Indonesia*. Jurnal BPPK, Vol. 4 No.3 (38-57). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan- Kementerian Keuangan.
- Tandiawan, E, et.al. 2015. *Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Manado Tahun 2001-2012*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15 No 1. Manado – FE dan Bisnis Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Tasrin, K dan Putri Wulandari. 2012. *Kajian Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 2. Sumedang - Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Admnsitrasi Negara.
- Wahyuni, I.G.A., et.al. 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 8 (458-477). Bali- Universitas Udayana.

Peraturan dan Undang-Undang:

Bappeda Provinsi Jawa Timur. 2008. *RPJMD Jawa Timur Tahun 2009-2014*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Skripsi:

Argi, R. 2011. *Analisis Belanja Daerah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009*. Semarang. Skripsi- Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Ariani, K.R. 2010. *Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)*. Surakarta. Skripsi - Universitas Sebelas Maret.

Qoyimah, K. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi di Jawa Timur (Periode 1982-2012)*. Jember. Skripsi-Universitas Jember.

Sianturi, Y.S. 2011. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara)*. Semarang. Skripsi – Universitas Diponegoro.

Suryanto, D. 2011. *Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008*. Semarang. Skripsi - Universitas Diponegoro.

Thesaurianto, K. 2007. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*. Semarang. Tesis – Universitas Diponegoro.

Waluyo, Joko. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia*. Penelitian. Yogyakarta-Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.

Wibowo, M.A. 2006. *Analisa Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Timur*. Malang. Skripsi- Universitas Brawijaya.



LAMPIRAN

Lampiran A. Penampang Permukaan Kabupaten/Kota Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Tinggi Rata-Rata	Luas Daerah
		Ibukota dari Permukaan Laut (M)	
1	Kab. Pacitan	9	1419
2	Kab. Ponorogo	108	1414
3	Kab. Trenggalek	108	1245
4	Kab. Tulungagung	89	1151
5	Kab. Blitar	181	1753
6	Kab. Kediri	71	1522
7	Kab. Malang	469	3456
8	Kab. Lumajang	61	1804
9	Kab. Jember	77	3316
10	Kab. Banyuwangi	8	3591
11	Kab. Bondowoso	257	1571
12	Kab. Situbondo	30	1651
13	Kab. Probolinggo	14	1707
14	Kab. Pasuruan	11	1486
15	Kab. Sidoarjo	5	719
16	Kab. Mojokerto	25	974
17	Kab. Jombang	44	1114
18	Kab. Nganjuk	58	1284
19	Kab. Madiun	75	1119
20	Kab. Magetan	371	706
21	Kab. Ngawi	51	1393
22	Kab. Bojonegoro	23	2316
23	Kab. Tuban	8	1978
24	Kab. Lamongan	7	1759
25	Kab. Gresik	12	1238
26	Kab Bangkalan	3	1303
27	Kab. Sampang	6	1234
28	Kab. Pamekasan	17	796
29	Kab. Sumenep	7	2085
30	Kota Kediri	68	69
31	Kota Blitar	187	33
32	Kota Malang	450	110
33	Kota Probolinggo	8	54
34	Kota Pasuruan	10	38
35	Kota Mojokerto	26	20
36	Kota Madiun	67	34
37	Kota Surabaya	2	331
38	Kota Batu	996	202
Jawa Timur		4019	47995

Sumber: BPS Jawa Timur

Lampiran B. PDRB Jawa Timur (Juta Rupiah)

Daerah	2010	2011	2012	2013	2014
1. Kab. Pacitan	6817400	7246200	7705000	8153200	8577600
2. Kab. Ponorogo	8961500	9472200	10038400	10557300	11114300
3. Kab. Trenggalek	7962100	8435200	8959500	9482200	9995100
4. Kab. Tulungagung	16776300	17845200	18999000	20144400	21242100
5. Kab. Blitar	16213900	17093900	18054500	18965200	19915300
6. Kab. Kediri	18254500	19408300	20644100	21824100	22980600
7. Kab. Malang	41342500	44091300	47076000	49711400	52546600
8. Kab. Lumajang	14260100	15144400	16053400	16940500	17854700
9. Kab. Jember	33375500	35208200	37262000	39224500	41465500
10. Kab. Banyuwangi	32463800	34720400	37235700	39649900	41994200
11. Kab. Bondowoso	8515900	9033000	9583400	10140100	10654900
12. Kab. Situbondo	8471400	8927100	9411600	10005300	10558500
13. Kab. Probolinggo	15028100	15912500	16936800	17838200	18751800
14. Kab. Pasuruan	61178300	65271600	70167100	74928800	79905300
15. Kab. Sidoarjo	81472700	87212400	93543900	99975700	106156400
16. Kab. Mojokerto	34147100	36405800	39047300	41579200	44225100
17. Kab. Jombang	17350800	18385000	19514800	20672300	21793200
18. Kab. Nganjuk	11405400	12061200	12767000	13473800	14161500
19. Kab. Madiun	8119700	8608700	9135700	9564100	10169700
20. Kab. Magetan	8277800	8744800	9251200	9789600	10296700
21. Kab. Ngawi	8456700	8973300	9568200	10203000	10775000
22. Kab. Bojonegoro	33291900	36751000	38136100	38993700	39912500
23. Kab. Tuban	28017900	29934300	31816300	33836700	35611400
24. Kab. Lamongan	16275200	17360500	18562700	19836100	21107600
25. Kab. Gresik	59068600	62898700	67248800	71304500	76340400
26. Kab Bangkalan	15881400	16406500	16173700	16204000	17369800
27. Kab. Sampang	10064000	10315300	10910900	11622000	11629600
28. Kab. Pamekasan	6994200	7429400	7894000	8369600	8856200
29. Kab. Sumenep	15136500	16064800	17665000	20162800	21478400
30. Kota Kediri	57550600	60020100	63185100	65407000	69220000
31. Kota Blitar	2855000	3038400	3236600	3445200	3648500
32. Kota Malang	31377300	33273700	35355700	37541700	39725700
33. Kota Probolinggo	4921300	5213900	5552100	5911300	6261900
34. Kota Pasuruan	3585400	3810700	4051200	4314100	4560500
35. Kota Mojokerto	2987200	3165600	3358400	3566400	3771800
36. Kota Madiun	6081200	6494400	6937700	7470700	7965500
37. Kota Surabaya	231204700	247686600	265892100	286057200	305308000
38. Kota Batu	6504400	6968000	7473600	8018000	8573400
39. JAWA TIMUR	990648800	1054401800	1124464600	1192841900	1262700200

Sumber: BPS Jawa Timur

Lampiran C. Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur (Juta Rupiah)

No	Daerah	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kab. Pacitan	25.217	34.384	44.997	57.171	67.334
2	Kab. Ponorogo	49.777	52.712	77.382	97.509	128.121
3	Kab. Trenggalek	50.622	61.066	67.278	80.965	109.185
4	Kab. Tulungagung	70.955	86.404	110.503	121.703	182.445
5	Kab. Blitar	61.999	66.516	77.036	96.053	135.078
6	Kab. Kediri	62.318	59.636	83.052	126.027	190.158
7	Kab. Malang	124.389	126.027	154.258	192.761	255.198
8	Kab. Lumajang	66.052	76.101	87.054	107.282	117.290
9	Kab. Jember	146.453	180.266	211.618	290.135	460.927
10	Kab. Banyuwangi	78.153	91.306	119.657	161.976	208.904
11	Kab. Bondowoso	46.483	50.556	57.780	67.784	84.852
12	Kab. Situbondo	36.440	50.801	57.030	67.498	101.695
13	Kab. Probolinggo	37.294	47.796	70.908	86.530	127.942
14	Kab. Pasuruan	87.686	125.427	152.010	198.793	296.721
15	Kab. Sidoarjo	288.732	393.766	597.756	721.795	919.706
16	Kab. Mojokerto	62.870	78.828	107.074	190.236	302.841
17	Kab. Jombang	100.571	105.048	117.508	143.932	205.761
18	Kab. Nganjuk	71.846	84.521	98.689	118.057	201.045
19	Kab. Madiun	35.958	49.802	57.699	65.989	100.463
20	Kab. Magetan	45.000	55.262	61.157	74.500	112.759
21	Kab. Ngawi	26.562	35.314	51.643	74.198	100.690
22	Kab. Bojonegoro	73.200	93.164	135.697	195.973	196.055
23	Kab. Tuban	73.740	92.130	119.900	185.415	205.170
24	Kab. Lamongan	94.066	103.336	108.606	124.606	178.890
25	Kab. Gresik	160.961	231.698	325.315	423.217	636.489
26	Kab Bangkalan	35.356	44.017	62.836	83.249	101.111
27	Kab. Sampang	35.120	40.506	52.287	63.041	77.697
28	Kab. Pamekasan	38.147	45.687	56.161	67.761	83.821
29	Kab. Sumenep	37.940	47.385	69.787	91.137	115.498
30	Kota Kediri	77.667	88.275	101.474	126.965	137.461
31	Kota Blitar	40.838	49.118	54.987	56.370	75.235
32	Kota Malang	101.519	158.447	175.985	262.741	336.246
33	Kota Probolinggo	40.071	56.619	60.446	73.521	80.748
34	Kota Pasuruan	34.614	30.532	33.207	51.343	69.230
35	Kota Mojokerto	29.519	34.633	48.056	60.806	73.241
36	Kota Madiun	28.146	38.038	46.554	55.684	85.740
37	Kota Surabaya	1.036.167	2.139.626	2.353.325	2.570.794	2.953.981
38	Kota Batu	30.000	30.000	31.494	39.249	59.856
39	JAWA TIMUR	5.143.999	7.615.043	9.068.160	9.523.902	11.103.565

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan

Lampiran D. Belanja Daerah Jawa Timur (Juta Rupiah)

NO.	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kab. Pacitan	618.192	753.953	898.281	974.152	1.110.749
2	Kab. Ponorogo	855.121	1.107.693	1.240.263	1.366.718	1.646.647
3	Kab. Trenggalek	718.753	931.337	1.039.168	1.043.299	1.189.303
4	Kab. Tulungagung	1.017.355	1.065.530	1.354.884	1.408.195	1.583.425
5	Kab. Blitar	925.616	1.157.481	1.366.851	1.493.178	1.794.968
6	Kab. Kediri	1.100.249	1.276.111	1.552.078	1.699.769	2.002.837
7	Kab. Malang	1.572.407	1.821.834	2.157.429	2.385.081	2.834.457
8	Kab. Lumajang	820.186	1.114.860	1.165.502	1.445.311	1.561.608
9	Kab. Jember	1.399.143	1.813.845	2.115.511	2.401.429	2.760.337
10	Kab. Banyuwangi	1.299.239	1.393.229	1.736.095	1.884.252	2.221.945
11	Kab. Bondowoso	698.582	754.375	985.851	1.160.729	1.390.182
12	Kab. Situbondo	690.650	866.162	983.044	1.136.683	1.381.318
13	Kab. Probolinggo	768.209	1.049.331	1.276.919	1.355.852	1.588.223
14	Kab. Pasuruan	1.126.236	1.414.171	1.581.766	1.894.773	2.190.622
15	Kab. Sidoarjo	1.548.894	1.823.870	2.189.901	2.581.880	2.897.821
16	Kab. Mojokerto	806.002	941.352	1.165.492	1.326.988	1.762.334
17	Kab. Jombang	951.699	1.088.394	1.273.933	1.444.127	1.821.852
18	Kab. Nganjuk	907.631	1.054.066	1.207.703	1.621.852	1.625.317
19	Kab. Madiun	692.374	938.110	1.029.393	1.165.411	1.309.108
20	Kab. Magetan	729.724	859.498	1.036.619	1.190.679	1.403.497
21	Kab. Ngawi	832.663	1.041.016	1.112.731	1.298.105	1.479.305
22	Kab. Bojonegoro	1.044.931	1.381.308	1.679.631	2.145.136	2.418.394
23	Kab. Tuban	871.391	1.102.329	1.342.317	1.517.459	1.692.246
24	Kab. Lamongan	942.040	1.213.856	1.432.606	1.550.103	1.768.378
25	Kab. Gresik	1.043.303	1.227.695	1.474.708	1.810.426	2.200.520
26	Kab Bangkalan	755.125	1.154.587	1.207.475	1.370.899	1.575.467
27	Kab. Sampang	743.014	749.437	1.024.721	1.181.911	1.211.114
28	Kab. Pamekasan	786.420	982.750	1.112.615	1.262.203	1.454.660
29	Kab. Sumenep	922.829	1.092.435	1.308.070	1.518.730	1.683.522
30	Kota Kediri	637.485	688.501	837.602	953.260	1.153.826
31	Kota Blitar	351.429	450.197	503.070	579.383	634.078
32	Kota Malang	844.476	1.010.799	1.261.071	1.543.987	1.683.670
33	Kota Probolinggo	472.578	579.909	597.984	672.445	783.247
34	Kota Pasuruan	409.108	453.029	462.241	529.985	702.748
35	Kota Mojokerto	399.649	426.346	487.642	571.109	648.104
36	Kota Madiun	430.226	492.142	602.343	744.119	831.055
37	Kota Surabaya	4.185.867	5.195.102	5.167.057	5.720.099	6.636.187
38	Kota Batu	416.385	450.502	482.785	565.765	761.572
39	JAWA TIMUR	7.826.710	10.626.361	12.214.783	15.356.564	17.811.135

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan

Lampiran E. Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Jawa Timur

NO.	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kab. Pacitan	6.53	6,29	6,33	5,82	5,21
2	Kab. Ponorogo	5.78	5,70	5,98	5,17	5,28
3	Kab. Trenggalek	6.11	5,94	6,21	5,83	5,41
4	Kab. Tulungagung	6.48	6,37	6,47	6,03	5,45
5	Kab. Blitar	6.08	5,43	5,62	5,04	5,01
6	Kab. Kediri	6.03	6,32	6,37	5,72	5,30
7	Kab. Malang	6.27	6,65	6,77	5,60	5,70
8	Kab. Lumajang	5.92	6,20	6,00	5,53	5,40
9	Kab. Jember	6.05	5,49	5,83	5,27	5,71
10	Kab. Banyuwangi	6.22	6,95	7,24	6,48	5,91
11	Kab. Bondowoso	5.64	6,07	6,09	5,81	5,08
12	Kab. Situbondo	5.75	5,38	5,43	6,31	5,53
13	Kab. Probolinggo	6.19	5,88	6,44	5,32	5,12
14	Kab. Pasuruan	6.14	6,69	7,50	6,79	6,64
15	Kab. Sidoarjo	5.62	7,04	7,26	6,88	6,18
16	Kab. Mojokerto	6.74	6,61	7,26	6,48	6,36
17	Kab. Jombang	6.12	5,96	6,15	5,93	5,42
18	Kab. Nganjuk	6.28	5,75	5,85	5,54	5,10
19	Kab. Madiun	5.92	6,02	6,12	5,67	5,34
20	Kab. Magetan	5.79	5,64	5,79	5,82	5,18
21	Kab. Ngawi	6.09	6,11	6,63	6,63	5,61
22	Kab. Bojonegoro	11.84	10,39	3,77	2,25	2,36
23	Kab. Tuban	6.22	6,84	6,29	6,35	5,24
24	Kab. Lamongan	6.89	6,67	6,92	6,86	6,41
25	Kab. Gresik	6.86	6,48	6,92	6,03	7,06
26	Kab Bangkalan	5.44	3,31	(1,42)	0,19	7,19
27	Kab. Sampang	5.34	2,50	5,77	6,52	0,07
28	Kab. Pamekasan	5.75	6,22	6,25	6,02	5,81
29	Kab. Sumenep	5.64	6,13	9,96	14,14	6,53
30	Kota Kediri	5.91	4,29	5,27	3,52	5,83
31	Kota Blitar	6.32	6,43	6,52	6,45	5,90
32	Kota Malang	6.25	6,04	6,26	6,18	5,82
33	Kota Probolinggo	6.12	5,95	6,49	6,47	5,93
34	Kota Pasuruan	5.66	6,28	6,31	6,49	5,71
35	Kota Mojokerto	6.09	5,97	6,09	6,19	5,76
36	Kota Madiun	6.93	6,79	6,83	7,68	6,62
37	Kota Surabaya	7.09	7,13	7,35	7,58	6,73
38	Kota Batu	7.01	7,13	7,26	7,28	6,93
39	JAWA TIMUR	6,68	6,44	6,64	6,08	5,86

Sumber: BPS Jawa Timur

Lampiran F. Indeks Gini Jawa Timur

NO	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kab. Pacitan	0,29	0,34	0,31	0,33	0,31
2	Kab. Ponorogo	0,25	0,29	0,31	0,34	0,31
3	Kab. Trenggalek	0,29	0,34	0,32	0,35	0,31
4	Kab. Tulungagung	0,27	0,32	0,34	0,37	0,31
5	Kab. Blitar	0,27	0,33	0,36	0,33	0,30
6	Kab. Kediri	0,26	0,31	0,32	0,30	0,31
7	Kab. Malang	0,30	0,33	0,32	0,38	0,33
8	Kab. Lumajang	0,24	0,27	0,27	0,23	0,23
9	Kab. Jember	0,25	0,31	0,28	0,26	0,26
10	Kab. Banyuwangi	0,24	0,32	0,29	0,30	0,29
11	Kab. Bondowoso	0,21	0,29	0,30	0,28	0,27
12	Kab. Situbondo	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29
13	Kab. Probolinggo	0,25	0,28	0,30	0,34	0,32
14	Kab. Pasuruan	0,26	0,28	0,30	0,28	0,28
15	Kab. Sidoarjo	0,27	0,31	0,33	0,30	0,30
16	Kab. Mojokerto	0,25	0,27	0,28	0,28	0,27
17	Kab. Jombang	0,26	0,37	0,30	0,28	0,32
18	Kab. Nganjuk	0,24	0,31	0,38	0,33	0,30
19	Kab. Madiun	0,25	0,29	0,34	0,30	0,28
20	Kab. Magetan	0,27	0,31	0,33	0,34	0,32
21	Kab. Ngawi	0,22	0,30	0,30	0,32	0,34
22	Kab. Bojonegoro	0,28	0,27	0,31	0,32	0,28
23	Kab. Tuban	0,25	0,28	0,27	0,30	0,24
24	Kab. Lamongan	0,23	0,29	0,27	0,31	0,27
25	Kab. Gresik	0,24	0,33	0,43	0,36	0,28
26	Kab. Bangkalan	0,29	0,30	0,28	0,28	0,33
27	Kab. Sampang	0,24	0,26	0,25	0,25	0,23
28	Kab. Pamekasan	0,26	0,28	0,24	0,25	0,26
29	Kab. Sumenep	0,27	0,27	0,30	0,29	0,25
30	Kota Kediri	0,28	0,39	0,39	0,33	0,31
31	Kota Blitar	0,33	0,34	0,38	0,40	0,35
32	Kota Malang	0,35	0,36	0,48	0,38	0,37
33	Kota Probolinggo	0,24	0,33	0,28	0,38	0,33
34	Kota Pasuruan	0,27	0,37	0,37	0,32	0,31
35	Kota Mojokerto	0,31	0,36	0,30	0,30	0,31
36	Kota Madiun	0,32	0,33	0,35	0,43	0,34
37	Kota Surabaya	0,36	0,37	0,40	0,37	0,39
38	Kota Batu	0,31	0,32	0,32	0,31	0,29
39	JAWA TIMUR	0,31	0,36	0,36	0,36	0,37

Sumber: BPS Jawa Timur

Lampiran G. Data Regresi Model Pertumbuhan (setelah diolah)

TAHUN	Kabupaten/Kota	Growth	FD	CV
2010	Kab. Pacitan	6817400	25217	618192
2011	Kab. Pacitan	7246200	34384	753953
2012	Kab. Pacitan	7705000	44997	898281
2013	Kab. Pacitan	8153200	57171	974152
2014	Kab. Pacitan	8577600	67334	1110749
2010	Kab. Ponorogo	8961500	49777	855121
2011	Kab. Ponorogo	9472200	52712	1107693
2012	Kab. Ponorogo	10038400	77382	1240263
2013	Kab. Ponorogo	10557300	97509	1366718
2014	Kab. Ponorogo	11114300	128121	1646647
2010	Kab. Trenggalek	7962100	50622	718753
2011	Kab. Trenggalek	8435200	61066	931337
2012	Kab. Trenggalek	8959500	67278	1039168
2013	Kab. Trenggalek	9482200	80965	1043299
2014	Kab. Trenggalek	9995100	109185	1189303
2010	Kab. Tulungagung	16776300	70955	1017355
2011	Kab. Tulungagung	17845200	86404	1065530
2012	Kab. Tulungagung	18999000	110503	1354884
2013	Kab. Tulungagung	20144400	121703	1408195
2014	Kab. Tulungagung	21242100	182445	1583425
2010	Kab. Blitar	16213900	61999	925616
2011	Kab. Blitar	17093900	66516	1157481
2012	Kab. Blitar	18054500	77036	1366851
2013	Kab. Blitar	18965200	96053	1493178
2014	Kab. Blitar	19915300	135078	1794968
2010	Kab. Kediri	18254500	62318	1100249
2011	Kab. Kediri	19408300	59636	1276111
2012	Kab. Kediri	20644100	83052	1552078
2013	Kab. Kediri	21824100	126027	1699769
2014	Kab. Kediri	22980600	190158	2002837
2010	Kab. Malang	41342500	124389	1572407
2011	Kab. Malang	44091300	126027	1821834
2012	Kab. Malang	47076000	154258	2157429
2013	Kab. Malang	49711400	192761	2385081
2014	Kab. Malang	52546600	255198	2834457
2010	Kab. Lumajang	14260100	66052	820186
2011	Kab. Lumajang	15144400	76101	1114860
2012	Kab. Lumajang	16053400	87054	1165502
2013	Kab. Lumajang	16940500	107282	1445311

2014	Kab. Lumajang	17854700	117290	1561608
2010	Kab. Jember	33375500	146453	1399143
2011	Kab. Jember	35208200	180266	1813845
2012	Kab. Jember	37262000	211618	2115511
2013	Kab. Jember	39224500	290135	2401429
2014	Kab. Jember	41465500	460927	2760337
2010	Kab. Banyuwangi	32463800	78153	1299239
2011	Kab. Banyuwangi	34720400	91306	1393229
2012	Kab. Banyuwangi	37235700	119657	1736095
2013	Kab. Banyuwangi	39649900	161976	1884252
2014	Kab. Banyuwangi	41994200	208904	2221945
2010	Kab. Bondowoso	8515900	46483	698582
2011	Kab. Bondowoso	9033000	50556	754375
2012	Kab. Bondowoso	9583400	57780	985851
2013	Kab. Bondowoso	10140100	67784	1160729
2014	Kab. Bondowoso	10654900	84852	1390182
2010	Kab. Situbondo	8471400	36440	690650
2011	Kab. Situbondo	8927100	50801	866162
2012	Kab. Situbondo	9411600	57030	983044
2013	Kab. Situbondo	10005300	67498	1136683
2014	Kab. Situbondo	10558500	101695	1381318
2010	Kab. Probolinggo	15028100	37294	768209
2011	Kab. Probolinggo	15912500	47796	1049331
2012	Kab. Probolinggo	16936800	70908	1276919
2013	Kab. Probolinggo	17838200	86530	1355852
2014	Kab. Probolinggo	18751800	127942	1588223
2010	Kab. Pasuruan	61178300	87686	1126236
2011	Kab. Pasuruan	65271600	125427	1414171
2012	Kab. Pasuruan	70167100	152010	1581766
2013	Kab. Pasuruan	74928800	198793	1894773
2014	Kab. Pasuruan	79905300	296721	2190622
2010	Kab. Sidoarjo	81472700	288732	1548894
2011	Kab. Sidoarjo	87212400	393766	1823870
2012	Kab. Sidoarjo	93543900	597756	2189901
2013	Kab. Sidoarjo	99975700	721795	2581880
2014	Kab. Sidoarjo	106156400	919706	2897821
2010	Kab. Mojokerto	34147100	62870	806002
2011	Kab. Mojokerto	36405800	78828	941352
2012	Kab. Mojokerto	39047300	107074	1165492
2013	Kab. Mojokerto	41579200	190236	1326988
2014	Kab. Mojokerto	44225100	302841	1762334
2010	Kab. Jombang	17350800	100571	951699
2011	Kab. Jombang	18385000	105048	1088394
2012	Kab. Jombang	19514800	117508	1273933

2013	Kab. Jombang	20672300	143932	1444127
2014	Kab. Jombang	21793200	205761	1821852
2010	Kab. Nganjuk	11405400	71846	907631
2011	Kab. Nganjuk	12061200	84521	1054066
2012	Kab. Nganjuk	12767000	98689	1207703
2013	Kab. Nganjuk	13473800	118057	1621852
2014	Kab. Nganjuk	14161500	201045	1625317
2010	Kab. Madiun	8119700	35958	692374
2011	Kab. Madiun	8608700	49802	938110
2012	Kab. Madiun	9135700	57699	1029393
2013	Kab. Madiun	9564100	65989	1165411
2014	Kab. Madiun	10169700	100463	1309108
2010	Kab. Magetan	8277800	45000	729724
2011	Kab. Magetan	8744800	55262	859498
2012	Kab. Magetan	9251200	61157	1036619
2013	Kab. Magetan	9789600	74500	1190679
2014	Kab. Magetan	10296700	112759	1403497
2010	Kab. Ngawi	8456700	26562	832663
2011	Kab. Ngawi	8973300	35314	1041016
2012	Kab. Ngawi	9568200	51643	1112731
2013	Kab. Ngawi	10203000	74198	1298105
2014	Kab. Ngawi	10775000	100690	1479305
2010	Kab. Bojonegoro	33291900	73200	1044931
2011	Kab. Bojonegoro	36751000	93164	1381308
2012	Kab. Bojonegoro	38136100	135697	1679631
2013	Kab. Bojonegoro	38993700	195973	2145136
2014	Kab. Bojonegoro	39912500	196055	2418394
2010	Kab. Tuban	28017900	73740	871391
2011	Kab. Tuban	29934300	92130	1102329
2012	Kab. Tuban	31816300	119900	1342317
2013	Kab. Tuban	33836700	185415	1517459
2014	Kab. Tuban	35611400	205170	1692246
2010	Kab. Lamongan	16275200	94066	942040
2011	Kab. Lamongan	17360500	103336	1213856
2012	Kab. Lamongan	18562700	108606	1432606
2013	Kab. Lamongan	19836100	124606	1550103
2014	Kab. Lamongan	21107600	178890	1768378
2010	Kab. Gresik	59068600	160961	1043303
2011	Kab. Gresik	62898700	231698	1227695
2012	Kab. Gresik	67248800	325315	1474708
2013	Kab. Gresik	71304500	423217	1810426
2014	Kab. Gresik	76340400	636489	2200520
2010	Kab. Bangkalan	15881400	35356	755125
2011	Kab. Bangkalan	16406500	44017	1154587

2012	Kab. Bangkalan	16173700	62836	1207475
2013	Kab. Bangkalan	16204000	83249	1370899
2014	Kab. Bangkalan	17369800	101111	1575467
2010	Kab. Sampang	10064000	35120	743014
2011	Kab. Sampang	10315300	40506	749437
2012	Kab. Sampang	10910900	52287	1024721
2013	Kab. Sampang	11622000	63041	1181911
2014	Kab. Sampang	11629600	77697	1211114
2010	Kab. Pamekasan	6994200	38147	786420
2011	Kab. Pamekasan	7429400	45687	982750
2012	Kab. Pamekasan	7894000	56161	1112615
2013	Kab. Pamekasan	8369600	67761	1262203
2014	Kab. Pamekasan	8856200	83821	1454660
2010	Kab. Sumenep	15136500	37940	922829
2011	Kab. Sumenep	16064800	47385	1092435
2012	Kab. Sumenep	17665000	69787	1308070
2013	Kab. Sumenep	20162800	91137	1518730
2014	Kab. Sumenep	21478400	115498	1683522
2010	Kota Kediri	57550600	77667	637485
2011	Kota Kediri	60020100	88275	688501
2012	Kota Kediri	63185100	101474	837602
2013	Kota Kediri	65407000	126965	953260
2014	Kota Kediri	69220000	137461	1153826
2010	Kota Blitar	2855000	40838	351429
2011	Kota Blitar	3038400	49118	450197
2012	Kota Blitar	3236600	54987	503070
2013	Kota Blitar	3445200	56370	579383
2014	Kota Blitar	3648500	75235	634078
2010	Kota Malang	31377300	101519	844476
2011	Kota Malang	33273700	158447	1010799
2012	Kota Malang	35355700	175985	1261071
2013	Kota Malang	37541700	262741	1543987
2014	Kota Malang	39725700	336246	1683670
2010	Kota Probolinggo	4921300	40071	472578
2011	Kota Probolinggo	5213900	56619	579909
2012	Kota Probolinggo	5552100	60446	597984
2013	Kota Probolinggo	5911300	73521	672445
2014	Kota Probolinggo	6261900	80748	783247
2010	Kota Pasuruan	3585400	34614	409108
2011	Kota Pasuruan	3810700	30532	453029
2012	Kota Pasuruan	4051200	33207	462241
2013	Kota Pasuruan	4314100	51343	529985
2014	Kota Pasuruan	4560500	69230	702748
2010	Kota Mojokerto	2987200	29519	399649

2011	Kota Mojokerto	3165600	34633	426346
2012	Kota Mojokerto	3358400	48056	487642
2013	Kota Mojokerto	3566400	60806	571109
2014	Kota Mojokerto	3771800	73241	648104
2010	Kota Madiun	6081200	28146	430226
2011	Kota Madiun	6494400	38038	492142
2012	Kota Madiun	6937700	46554	602343
2013	Kota Madiun	7470700	55684	744119
2014	Kota Madiun	7965500	85740	831055
2010	Kota Surabaya	231204700	1036167	4185867
2011	Kota Surabaya	247686600	2139626	5195102
2012	Kota Surabaya	265892100	2353325	5167057
2013	Kota Surabaya	286057200	2570794	5720099
2014	Kota Surabaya	305308000	2953981	6636187
2010	Kota Batu	6504400	30000	416385
2011	Kota Batu	6968000	30000	450502
2012	Kota Batu	7473600	31494	482785
2013	Kota Batu	8018000	39249	565765
2014	Kota Batu	8573400	59856	761572

Lampiran H. Data Regresi Model Kesenjangan (setelah diolah)

TAHUN	Kabupaten/Kota	Disparity	LogFD	LogCV
2010	Kab. Pacitan	0.29	10.40	11.79
2011	Kab. Pacitan	0.34	10.54	11.88
2012	Kab. Pacitan	0.31	10.65	11.95
2013	Kab. Pacitan	0.33	10.76	11.99
2014	Kab. Pacitan	0.31	10.83	12.05
2010	Kab. Ponorogo	0.25	10.70	11.93
2011	Kab. Ponorogo	0.29	10.72	12.04
2012	Kab. Ponorogo	0.31	10.89	12.09
2013	Kab. Ponorogo	0.34	10.99	12.14
2014	Kab. Ponorogo	0.31	11.11	12.22
2010	Kab. Trenggalek	0.29	10.70	11.86
2011	Kab. Trenggalek	0.34	10.79	11.97
2012	Kab. Trenggalek	0.32	10.83	12.02
2013	Kab. Trenggalek	0.35	10.91	12.02
2014	Kab. Trenggalek	0.31	11.04	12.08
2010	Kab. Tulungagung	0.27	10.85	12.01
2011	Kab. Tulungagung	0.32	10.94	12.03
2012	Kab. Tulungagung	0.34	11.04	12.13
2013	Kab. Tulungagung	0.37	11.09	12.15
2014	Kab. Tulungagung	0.31	11.26	12.20
2010	Kab. Blitar	0.27	10.79	11.97
2011	Kab. Blitar	0.33	10.82	12.06
2012	Kab. Blitar	0.36	10.89	12.14
2013	Kab. Blitar	0.33	10.98	12.17
2014	Kab. Blitar	0.30	11.13	12.25
2010	Kab. Kediri	0.26	10.79	12.04
2011	Kab. Kediri	0.31	10.78	12.11
2012	Kab. Kediri	0.32	10.92	12.19
2013	Kab. Kediri	0.30	11.10	12.23
2014	Kab. Kediri	0.31	11.28	12.30
2010	Kab. Malang	0.30	11.09	12.20
2011	Kab. Malang	0.33	11.10	12.26
2012	Kab. Malang	0.32	11.19	12.33
2013	Kab. Malang	0.38	11.29	12.38
2014	Kab. Malang	0.33	11.41	12.45
2010	Kab. Lumajang	0.24	10.82	11.91
2011	Kab. Lumajang	0.27	10.88	12.05
2012	Kab. Lumajang	0.27	10.94	12.07
2013	Kab. Lumajang	0.23	11.03	12.16

2014	Kab. Lumajang	0.23	11.07	12.19
2010	Kab. Jember	0.25	11.17	12.15
2011	Kab. Jember	0.31	11.26	12.26
2012	Kab. Jember	0.28	11.33	12.33
2013	Kab. Jember	0.26	11.46	12.38
2014	Kab. Jember	0.26	11.66	12.44
2010	Kab. Banyuwangi	0.24	10.89	12.11
2011	Kab. Banyuwangi	0.32	10.96	12.14
2012	Kab. Banyuwangi	0.29	11.08	12.24
2013	Kab. Banyuwangi	0.30	11.21	12.28
2014	Kab. Banyuwangi	0.29	11.32	12.35
2010	Kab. Bondowoso	0.21	10.67	11.84
2011	Kab. Bondowoso	0.29	10.70	11.88
2012	Kab. Bondowoso	0.30	10.76	11.99
2013	Kab. Bondowoso	0.28	10.83	12.06
2014	Kab. Bondowoso	0.27	10.93	12.14
2010	Kab. Situbondo	0.26	10.56	11.84
2011	Kab. Situbondo	0.26	10.71	11.94
2012	Kab. Situbondo	0.27	10.76	11.99
2013	Kab. Situbondo	0.28	10.83	12.06
2014	Kab. Situbondo	0.29	11.01	12.14
2010	Kab. Probolinggo	0.25	10.57	11.89
2011	Kab. Probolinggo	0.28	10.68	12.02
2012	Kab. Probolinggo	0.30	10.85	12.11
2013	Kab. Probolinggo	0.34	10.94	12.13
2014	Kab. Probolinggo	0.32	11.11	12.20
2010	Kab. Pasuruan	0.26	10.94	12.05
2011	Kab. Pasuruan	0.28	11.10	12.15
2012	Kab. Pasuruan	0.30	11.18	12.20
2013	Kab. Pasuruan	0.28	11.30	12.28
2014	Kab. Pasuruan	0.28	11.47	12.34
2010	Kab. Sidoarjo	0.27	11.46	12.19
2011	Kab. Sidoarjo	0.31	11.60	12.26
2012	Kab. Sidoarjo	0.33	11.78	12.34
2013	Kab. Sidoarjo	0.30	11.86	12.41
2014	Kab. Sidoarjo	0.30	11.96	12.46
2010	Kab. Mojokerto	0.25	10.80	11.91
2011	Kab. Mojokerto	0.27	10.90	11.97
2012	Kab. Mojokerto	0.28	11.03	12.07
2013	Kab. Mojokerto	0.28	11.28	12.12
2014	Kab. Mojokerto	0.27	11.48	12.25
2010	Kab. Jombang	0.26	11.00	11.98
2011	Kab. Jombang	0.37	11.02	12.04
2012	Kab. Jombang	0.30	11.07	12.11

2013	Kab. Jombang	0.28	11.16	12.16
2014	Kab. Jombang	0.32	11.31	12.26
2010	Kab. Nganjuk	0.24	10.86	11.96
2011	Kab. Nganjuk	0.31	10.93	12.02
2012	Kab. Nganjuk	0.38	10.99	12.08
2013	Kab. Nganjuk	0.33	11.07	12.21
2014	Kab. Nganjuk	0.30	11.30	12.21
2010	Kab. Madiun	0.25	10.56	11.84
2011	Kab. Madiun	0.29	10.70	11.97
2012	Kab. Madiun	0.34	10.76	12.01
2013	Kab. Madiun	0.30	10.82	12.07
2014	Kab. Madiun	0.28	11.00	12.12
2010	Kab. Magetan	0.27	10.65	11.86
2011	Kab. Magetan	0.31	10.74	11.93
2012	Kab. Magetan	0.33	10.76	12.02
2013	Kab. Magetan	0.34	10.87	12.08
2014	Kab. Magetan	0.32	11.05	12.15
2010	Kab. Ngawi	0.22	10.42	11.92
2011	Kab. Ngawi	0.30	10.55	12.02
2012	Kab. Ngawi	0.30	10.71	12.05
2013	Kab. Ngawi	0.32	10.87	12.11
2014	Kab. Ngawi	0.34	11.00	12.17
2010	Kab. Bojonegoro	0.28	10.86	12.02
2011	Kab. Bojonegoro	0.27	10.97	12.14
2012	Kab. Bojonegoro	0.31	11.13	12.23
2013	Kab. Bojonegoro	0.32	11.29	12.33
2014	Kab. Bojonegoro	0.28	11.29	12.38
2010	Kab. Tuban	0.25	10.87	11.94
2011	Kab. Tuban	0.28	10.96	12.04
2012	Kab. Tuban	0.27	11.08	12.13
2013	Kab. Tuban	0.30	11.27	12.18
2014	Kab. Tuban	0.24	11.31	12.23
2010	Kab. Lamongan	0.23	10.97	11.97
2011	Kab. Lamongan	0.29	11.01	12.08
2012	Kab. Lamongan	0.27	11.04	12.16
2013	Kab. Lamongan	0.31	11.10	12.19
2014	Kab. Lamongan	0.27	11.25	12.25
2010	Kab. Gresik	0.24	11.21	12.02
2011	Kab. Gresik	0.33	11.36	12.09
2012	Kab. Gresik	0.43	11.51	12.17
2013	Kab. Gresik	0.36	11.63	12.26
2014	Kab. Gresik	0.28	11.80	12.34
2010	Kab. Bangkalan	0.29	10.55	11.88
2011	Kab. Bangkalan	0.30	10.64	12.06

2012	Kab. Bangkalan	0.28	10.80	12.08
2013	Kab. Bangkalan	0.28	10.92	12.14
2014	Kab. Bangkalan	0.33	11.00	12.20
2010	Kab. Sampang	0.24	10.55	11.87
2011	Kab. Sampang	0.26	10.61	11.87
2012	Kab. Sampang	0.25	10.72	12.01
2013	Kab. Sampang	0.25	10.80	12.07
2014	Kab. Sampang	0.23	10.89	12.08
2010	Kab. Pamekasan	0.26	10.58	11.90
2011	Kab. Pamekasan	0.28	10.66	11.99
2012	Kab. Pamekasan	0.24	10.75	12.05
2013	Kab. Pamekasan	0.25	10.83	12.10
2014	Kab. Pamekasan	0.26	10.92	12.16
2010	Kab. Sumenep	0.27	10.58	11.97
2011	Kab. Sumenep	0.27	10.68	12.04
2012	Kab. Sumenep	0.30	10.84	12.12
2013	Kab. Sumenep	0.29	10.96	12.18
2014	Kab. Sumenep	0.25	11.06	12.23
2010	Kota Kediri	0.28	10.89	11.80
2011	Kota Kediri	0.39	10.95	11.84
2012	Kota Kediri	0.39	11.01	11.92
2013	Kota Kediri	0.33	11.10	11.98
2014	Kota Kediri	0.31	11.14	12.06
2010	Kota Blitar	0.33	10.61	11.55
2011	Kota Blitar	0.34	10.69	11.65
2012	Kota Blitar	0.38	10.74	11.70
2013	Kota Blitar	0.40	10.75	11.76
2014	Kota Blitar	0.35	10.88	11.80
2010	Kota Malang	0.35	11.01	11.93
2011	Kota Malang	0.36	11.20	12.00
2012	Kota Malang	0.48	11.25	12.10
2013	Kota Malang	0.38	11.42	12.19
2014	Kota Malang	0.37	11.53	12.23
2010	Kota Probolinggo	0.24	10.60	11.67
2011	Kota Probolinggo	0.33	10.75	11.76
2012	Kota Probolinggo	0.28	10.78	11.78
2013	Kota Probolinggo	0.38	10.87	11.83
2014	Kota Probolinggo	0.33	10.91	11.89
2010	Kota Pasuruan	0.27	10.54	11.61
2011	Kota Pasuruan	0.37	10.48	11.66
2012	Kota Pasuruan	0.37	10.52	11.66
2013	Kota Pasuruan	0.32	10.71	11.72
2014	Kota Pasuruan	0.31	10.84	11.85
2010	Kota Mojokerto	0.31	10.47	11.60

2011	Kota Mojokerto	0.36	10.54	11.63
2012	Kota Mojokerto	0.30	10.68	11.69
2013	Kota Mojokerto	0.30	10.78	11.76
2014	Kota Mojokerto	0.31	10.86	11.81
2010	Kota Madiun	0.32	10.45	11.63
2011	Kota Madiun	0.33	10.58	11.69
2012	Kota Madiun	0.35	10.67	11.78
2013	Kota Madiun	0.43	10.75	11.87
2014	Kota Madiun	0.34	10.93	11.92
2010	Kota Surabaya	0.36	12.02	12.62
2011	Kota Surabaya	0.37	12.33	12.72
2012	Kota Surabaya	0.40	12.37	12.71
2013	Kota Surabaya	0.37	12.41	12.76
2014	Kota Surabaya	0.39	12.47	12.82
2010	Kota Batu	0.31	10.48	11.62
2011	Kota Batu	0.32	10.48	11.65
2012	Kota Batu	0.32	10.50	11.68
2013	Kota Batu	0.31	10.59	11.75
2014	Kota Batu	0.29	10.78	11.88

Lampiran I. Hasil Regresi Data Panel**I.1 Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Model *Fixed Effect*****I.1.a Hasil Estimasi Regresi Data Panel Pertumbuhan**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Dependent Variable: GROWTH?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 04/05/16 Time: 16:12				
Sample: 2010 2014				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 38				
Total pool (balanced) observations: 190				
C	20094148	771690.4	26.03913	0.0000
FD?	32.86927	1.847194	17.79416	0.0000
CV?	2.969514	0.721913	4.113397	0.0001
Fixed Effects (Cross)				
_PACITAN--C	-16486999			
_PONOROGO--C	-16423074			
_TRENGGALEK--C	-16476945			
_TULUNGAGUNG--C	-8671489.			
_BLITAR--C	-8918043.			
_KEDIRI--C	-7430160.			
_MALANG--C	14857280			
_LUMAJANG--C	-10653845			
_JEMBER--C	2506478.			
_BANYUWANGI--C	7711122.			
_BONDOWOSO--C	-15493266			
_SITUBONDO--C	-15683904			
_PROBOLINGGO--C	-9222390.			
_PASURUAN--C	39663869			
_SIDOARJO--C	47812789			
_MOJOKERTO--C	10545239			
_JOMBANG--C	-8881834.			
_NGANJUK--C	-14905618			
_MADIUN--C	-16061207			
_MAGETAN--C	-16214463			
_NGAWI--C	-15818003			
_BOJONEGORO--C	7611266.			
_TUBAN--C	3427261.			
_LAMONGAN--C	-9574589.			
_GRESIK--C	30985148			
_BANGKALAN--C	-9435046.			
_SAMPANG--C	-13868036			
_PAMEKASAN--C	-17427303			
_SUMENEP--C	-8246279.			
_KOTAKEDIRI--C	36949795			
_KOTABLITAR--C	-20162937			
_KOTAMALANG--C	4789417.			
_KOTAPROBOLINGGO--C	-18413938			
_KOTAPASURUAN--C	-18987636			
_KOTAMOJOKERTO--C	-19847376			
_KOTAMADIUN--C	-16616098			
_KOTASURABAYA--C	1.58E+08			
_KOTABATU--C	-15429525			

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.998149	Mean dependent var	29639182
Adjusted R-squared	0.997668	S.D. dependent var	44720482
S.E. of regression	2159620.	Akaike info criterion	32.19343
Sum squared resid	7.00E+14	Schwarz criterion	32.87701
Log likelihood	-3018.376	Hannan-Quinn criter.	32.47034
F-statistic	2074.201	Durbin-Watson stat	1.685337
Prob(F-statistic)	0.000000		



I.1.b Hasil Estimasi Regresi Data Panel Kesenjangan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Dependent Variable: DISPARITY?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 04/06/16 Time: 06:35				
Sample: 2010 2014				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 38				
Total pool (balanced) observations: 190				
C	-1.454364	0.415344	-3.501586	0.0006
LOGFD?	-0.079120	0.043813	-1.805852	0.0729
LOGCV?	0.217892	0.069246	3.146647	0.0020
Fixed Effects (Cross)				
_PACITAN--C	0.011996			
_PONOROGO--C	-0.017660			
_TRENGGALEK--C	0.022606			
_TULUNGAGUNG--C	0.012167			
_BLITAR--C	-0.003904			
_KEDIRI--C	-0.029991			
_MALANG--C	-0.011528			
_LUMAJANG--C	-0.062695			
_JEMBER--C	-0.056254			
_BANYUWANGI--C	-0.043550			
_BONDOWOSO--C	-0.033664			
_SITUBONDO--C	-0.034595			
_PROBOLINGGO--C	-0.020724			
_PASURUAN--C	-0.038805			
_SIDOARJO--C	-0.002445			
_MOJOKERTO--C	-0.026212			
_JOMBANG--C	0.000872			
_NGANJUK--C	0.003435			
_MADIUN--C	-0.016813			
_MAGETAN--C	0.007520			
_NGAWI--C	-0.028732			
_BOJONEGORO--C	-0.037412			
_TUBAN--C	-0.036928			
_LAMONGAN--C	-0.038492			
_GRESIK--C	0.039348			
_BANGKALAN--C	-0.026957			
_SAMPANG--C	-0.062291			
_PAMEKASAN--C	-0.060675			
_SUMENEP--C	-0.051478			
_KOTAKEDIRI--C	0.068834			
_KOTABLITAR--C	0.116044			
_KOTAMALANG--C	0.100680			
_KPROBOLINGGO--C	0.051360			
_KOTAPASURUAN--C	0.073123			
_KOTAMOJOKERTO--C	0.065356			
_KOTAMADIUN--C	0.086716			
_KOTASURABAYA--C	0.034228			
_KOTABATU--C	0.047522			
Effects Specification				

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.602858	Mean dependent var	0.304053
Adjusted R-squared	0.499601	S.D. dependent var	0.044077
S.E. of regression	0.031179	Akaike info criterion	-3.913460
Sum squared resid	0.145822	Schwarz criterion	-3.229876
Log likelihood	411.7787	Hannan-Quinn criter.	-3.636550
F-statistic	5.838424	Durbin-Watson stat	2.199686
Prob(F-statistic)	0.000000		



I.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Model *Random Effect*

I.2.a Hasil Estimasi Regresi Data Panel Pertumbuhan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Dependent Variable: GROWTH?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 04/05/16 Time: 16:13				
Sample: 2010 2014				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 38				
Total pool (balanced) observations: 190				
Swamy and Arora estimator of component variances				
C	18936246	2121291.	8.926756	0.0000
FD?	36.10498	1.824366	19.79043	0.0000
CV?	3.427981	0.716854	4.781976	0.0000
Random Effects (Cross)				
_PACITAN--C	-15777819			
_PONOROGO--C	-15997324			
_TRENGGALEK--C	-15909494			
_TULUNGAGUNG--C	-8420511.			
_BLITAR--C	-8606628.			
_KEDIRI--C	-7263729.			
_MALANG--C	14385591			
_LUMAJANG--C	-10285149			
_JEMBER--C	1856433.			
_BANYUWANGI--C	7611624.			
_BONDOWOSO--C	-14898472			
_SITUBONDO--C	-15097995			
_PROBOLINGGO--C	-8802752.			
_PASURUAN--C	39266118			
_SIDOARJO--C	45780441			
_MOJOKERTO--C	10606221			
_JOMBANG--C	-8708103.			
_NGANJUK--C	-14616022			
_MADIUN--C	-15477638			
_MAGETAN--C	-15662672			
_NGAWI--C	-15279473			
_BOJONEGORO--C	7478195.			
_TUBAN--C	3526992.			
_LAMONGAN--C	-9385617.			
_GRESIK--C	30092787			
_BANGKALAN--C	-8988130.			
_SAMPANG--C	-13251163			
_PAMEKASAN--C	-16865737			
_SUMENEP--C	-7871493.			
_KOTAKEDIRI--C	37139141			
_KOTABLITAR--C	-19293965			
_KOTAMALANG--C	4666615.			
_KOTAPROBOLINGGO--C	-17631857			
_KOTAPASURUAN--C	-18092477			
_KOTAMOJOKERTO--C	-18962226			
_KOTAMADIUN--C	-15807830			
_KOTASURABAYA--C	1.49E+08			
_KOTABATU--C	-14549237			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		12199122	0.9696
Idiosyncratic random		2159620.	0.0304
Weighted Statistics			
R-squared	0.747761	Mean dependent var	2339231.
Adjusted R-squared	0.745063	S.D. dependent var	6164638.
S.E. of regression	3112605.	Sum squared resid	1.81E+15
F-statistic	277.1799	Durbin-Watson stat	0.780590
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.546075	Mean dependent var	29639182
Sum squared resid	1.72E+17	Durbin-Watson stat	0.008242



I.2.b Hasil Estimasi Regresi Data Panel Kesenjangan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Dependent Variable: DISPARITY?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 04/06/16 Time: 06:36				
Sample: 2010 2014				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 38				
Total pool (balanced) observations: 190				
Swamy and Arora estimator of component variances				
C	0.153416	0.244108	0.628476	0.5305
LOGFD?	0.060622	0.022008	2.754488	0.0065
LOGCV?	-0.042718	0.035957	-1.188029	0.2363
Random Effects (Cross)				
_PACITAN--C	0.020607			
_PONOROGO--C	0.002320			
_TRENGGALEK--C	0.017059			
_TULUNGAGUNG--C	0.012443			
_BLITAR--C	0.015071			
_KEDIRI--C	0.001022			
_MALANG--C	0.018798			
_LUMAJANG--C	-0.039873			
_JEMBER--C	-0.033781			
_BANYUWANGI--C	-0.011721			
_BONDOWOSO--C	-0.018688			
_SITUBONDO--C	-0.016625			
_PROBOLINGGO--C	0.002735			
_PASURUAN--C	-0.023164			
_SIDOARJO--C	-0.026837			
_MOJOKERTO--C	-0.030592			
_JOMBANG--C	-0.002797			
_NGANJUK--C	0.004971			
_MADIUN--C	-0.001119			
_MAGETAN--C	0.013460			
_NGAWI--C	0.006173			
_BOJONEGORO--C	-0.009580			
_TUBAN--C	-0.030810			
_LAMONGAN--C	-0.024395			
_GRESIK--C	-0.001916			
_BANGKALAN--C	0.003480			
_SAMPANG--C	-0.033819			
_PAMEKASAN--C	-0.024457			
_SUMENEP--C	-0.012252			
_KOTAKEDIRI--C	0.020854			
_KOTABLITAR--C	0.041430			
_KOTAMALANG--C	0.050252			
_KPROBOLINGGO--C	0.006313			
_KOTAPASURUAN--C	0.022989			
_KOTAMOJOKERTO--C	0.011759			
_KOTAMADIUN--C	0.042321			
_KOTASURABAYA--C	0.015987			
_KOTABATU--C	0.012382			
Effects Specification				

		S.D.	Rho
Cross-section random		0.024078	0.3736
Idiosyncratic random		0.031179	0.6264
Weighted Statistics			
R-squared	0.068992	Mean dependent var	0.152372
Adjusted R-squared	0.059035	S.D. dependent var	0.033894
S.E. of regression	0.032878	Sum squared resid	0.202143
F-statistic	6.928797	Durbin-Watson stat	1.725724
Prob(F-statistic)	0.001251		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.112487	Mean dependent var	0.304053
Sum squared resid	0.325876	Durbin-Watson stat	1.070478



Lampiran J. Hasil Uji Hausman**J.1 Hasil Uji Hausman Pertumbuhan**

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Pool: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	203.449750	2	0.0000	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
FD?	32.869274	36.104978	0.083817	0.0000
CV?	2.969514	3.427981	0.007278	0.0000
Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: GROWTH?				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/05/16 Time: 16:15				
Sample: 2010 2014				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 38				
Total pool (balanced) observations: 190				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20094148	771690.4	26.03913	0.0000
FD?	32.86927	1.847194	17.79416	0.0000
CV?	2.969514	0.721913	4.113397	0.0001
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998149	Mean dependent var	29639182	
Adjusted R-squared	0.997668	S.D. dependent var	44720482	
S.E. of regression	2159620.	Akaike info criterion	32.19343	
Sum squared resid	7.00E+14	Schwarz criterion	32.87701	
Log likelihood	-3018.376	Hannan-Quinn criter.	32.47034	
F-statistic	2074.201	Durbin-Watson stat	1.685337	
Prob(F-statistic)	0.000000			

J.2 Hasil Uji Hausman Kesenjangan

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Pool: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	22.934431	2	0.0000	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOGFD?	-0.079120	0.060622	0.001435	0.0002
LOGCV?	0.217892	-0.042718	0.003502	0.0000
Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: DISPARITY?				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/06/16 Time: 06:36				
Sample: 2010 2014				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 38				
Total pool (balanced) observations: 190				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.454364	0.415344	-3.501586	0.0006
LOGFD?	-0.079120	0.043813	-1.805852	0.0729
LOGCV?	0.217892	0.069246	3.146647	0.0020
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.602858	Mean dependent var	0.304053	
Adjusted R-squared	0.499601	S.D. dependent var	0.044077	
S.E. of regression	0.031179	Akaike info criterion	-3.913460	
Sum squared resid	0.145822	Schwarz criterion	-3.229876	
Log likelihood	411.7787	Hannan-Quinn criter.	-3.636550	
F-statistic	5.838424	Durbin-Watson stat	2.199686	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran K. Hasil Uji Asumsi Klasik

K.1 Hasil Uji Asumsi Klasik Pertumbuhan

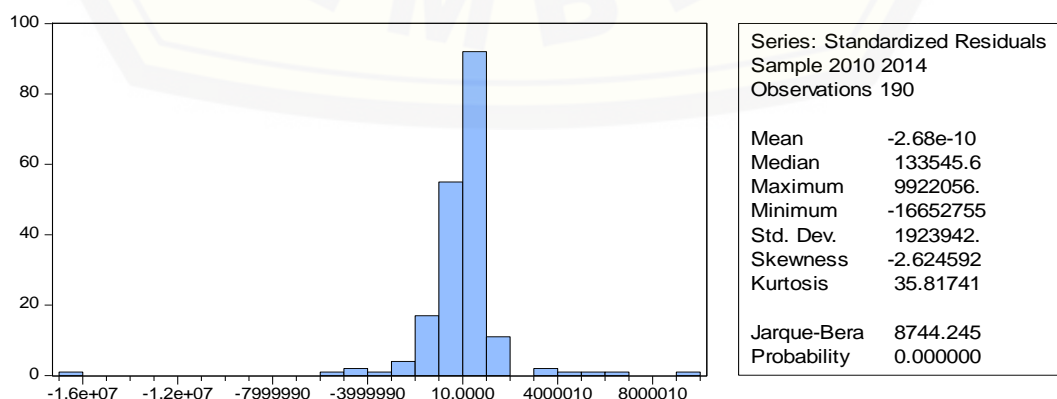
K.1.a Uji Multikolinearitas

	FD	CV
FD	1.000000	0.891943
CV	0.891943	1.000000

K.1.b Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: LOG(RES2)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 03/21/16 Time: 09:12				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 38				
Total panel (balanced) observations: 190				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.58565	0.885318	27.77043	0.0000
FD	-2.43E-07	2.12E-06	-0.114594	0.9089
CV	1.07E-06	8.28E-07	1.297434	0.1965
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.394876	Mean dependent var	25.95566	
Adjusted R-squared	0.237544	S.D. dependent var	2.837435	
S.E. of regression	2.477612	Akaike info criterion	4.837131	
Sum squared resid	920.7843	Schwarz criterion	5.520715	
Log likelihood	-419.5275	Hannan-Quinn criter.	5.114041	
F-statistic	2.509824	Durbin-Watson stat	2.364229	
Prob(F-statistic)	0.000038			

K.1.c Uji Normalitas



K.2 Hasil Uji Asumsi Klasik Kesenjangan

K.2.a Uji Multikolinearitas

	LOGFD	LOGCV
LOGFD	1.000000	0.864974
LOGCV	0.864974	1.000000

K.2.b Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: LOG(RES2)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 03/21/16 Time: 09:32				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 38				
Total panel (balanced) observations: 190				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	37.70188	27.24057	1.384034	0.1684
LOGFD	6.311660	2.873501	2.196505	0.0296
LOGCV	-9.581574	4.541518	-2.109773	0.0365
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.254260	Mean dependent var	-8.518533	
Adjusted R-squared	0.060368	S.D. dependent var	2.109578	
S.E. of regression	2.044912	Akaike info criterion	4.453250	
Sum squared resid	627.2496	Schwarz criterion	5.136834	
Log likelihood	-383.0588	Hannan-Quinn criter.	4.730160	
F-statistic	1.311346	Durbin-Watson stat	2.824815	
Prob(F-statistic)	0.127044			

K.2.c Uji Normalitas

